KOPERASI
RUMAH LAMA
HARAPAN BARU

Hukman Reni

Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru

Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru

Hukman Reni

Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru

Diterbitkan pertama kali oleh Swakelola
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All Rights Reserved

Hak penerbitan pada Swakelola
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama:
Oktober 2025

Ukuran:
13,97 x 21,59 cm

ISBN
9-783127-323207

Penulis:
Hukman Reni

Desain Cover:
Hukman Reni

Diterbitkan Oleh:
Swakelola

Jl. Merdeka Timur, RT 004 RW 020, Kel, Abadijaya,
Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.
Telp +62 85-803-626-547
Email: hukman.reni@gmail.com
Whatsapp : 085-803-626-547

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bagian I

Akar dan Jejak Sejarah

Rumah Tua yang Tak Pernah Benar-benar Runtuh 1

Dari Toko Kecil Hingga Stadion Raksasa ... 5

Jejak Panjang Koperasi di Tanah Air 12

Koperasi Jalan Alternatif 19

Gotong Royong yang Lupa Jalan Pulang 24

Legenda Dua Laci 28

Bagian II

Krisis dan Kritik

Aplikasi yang Tak Pernah Diunduh 34

Demokrasi dan Anggaran yang Terbuang . 38

Koperasi dan Politik Lokal 44

Modal Sosial vs Modal Riil 48

Dari Gudang Beras ke Dashboard Digital.. 52

Bagian III

Dilema Modernisasi

Menyulam Jala di Tengah Ombak 58
Antara Tradisi dan Teknologi 62
Saat Anggota Menjadi Username 66
Apakah Koperasi Membebaskan? 70

Bagian IV

Jalan Pulang ke Akar Rakyat

Koperasi dan Keadilan Sosial 76
Reinkarnasi atau Renovasi? 80
Koperasi Kembali ke Desa 84
Revolusi Moral Ekonomi Rakyat 88

Bagian V

Horizon Baru

Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru 94
Epilog: Dari Skeptisisme ke Kebangkitan Koperasi 107

Referensi

Profil Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan. Buku, “Koperasi, Rumah Lama, Harapan Baru” ini, lahir dari sebuah keprihatinan sekaligus harapan bahwa keprihatinan atas kondisi koperasi dan ekonomi rakyat yang kerap terpinggirkan, dan harapan agar koperasi dapat kembali menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat desa, penggerak kemandirian, dan simbol keadilan sosial.

Koperasi sering dipahami secara sempit, sekadar lembaga ekonomi atau formalitas administratif. Namun, bagi saya, koperasi adalah lebih dari itu: ia adalah rumah kolektif, ruang pendidikan moral, wadah solidaritas, dan sarana perlawanan terhadap ketimpangan.

Buku ini menelusuri perjalanan koperasi dari sejarah awalnya di Indonesia, dinamika sosial-politik yang membentuknya, hingga tantangan modernisasi dan digitalisasi.

Saya juga menyinggung pengalaman global koperasi agar kita dapat belajar dari praktik internasional, baik keberhasilan maupun paradoks yang muncul.

Melalui bab-bab ini, saya ingin mengajak pembaca merenung dan bertanya: Apakah koperasi hanya sekadar alat ekonomi atau bisa benar-benar menjadi rumah bersama bagi rakyat? Bagaimana nilai gotong royong, moralitas, dan partisipasi bisa dijaga di tengah arus globalisasi, teknologi, dan birokrasi? Buku ini mencoba memberi jawaban, bukan melalui teori semata, tetapi melalui refleksi nyata, kisah inspiratif, dan kritik sosial yang jujur.

Saya menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Banyak pihak yang telah memberikan masukan dan pengalaman berharga tentang koperasi, namun ruang masih terbuka untuk penafsiran, kritik, dan pengembangan lebih lanjut. Harapan saya, “Koperasi: Rumah Lama, Harapan Baru” dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengurus koperasi, anggota, akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap ekonomi rakyat. Semoga ia bukan hanya dibaca, tetapi juga dijadikan pijakan untuk tindakan nyata.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan inspirasi dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini mampu menyalakan kembali bara semangat koperasi, dari skeptisisme menjadi kebangkitan, dari formalitas menjadi harapan nyata bagi rakyat.

Jakarta, Oktober 2025

Penulis

Rumah Tua yang Tak Pernah Benar-Benar Runtuh

Di ujung waktu yang sibuk dan gaduh, masih berdiri sebuah rumah tua. Dindingnya mungkin retak, catnya mengelupas, dan atapnya bocor di sana-sini. Namun anehnya, rumah itu tak pernah benar-benar runtuh. Sebab ia berdiri bukan di atas batu bata, melainkan di atas tekad manusia untuk saling menolong.

Itulah koperasi. Rumah sederhana yang dibangun dari kejujuran, gotong royong, dan harapan untuk hidup bersama tanpa saling menindas.

Koperasi tidak lahir di ruang kuliah ekonomi, bukan pula di meja rapat para pejabat. Ia tumbuh di lorong-lorong sempit penderitaan, dari lapar yang menolak menyerah, dari rakyat kecil yang menolak ditelan keserakahan.

Sejarah mencatat, di Inggris abad ke-19 para buruh miskin di Rochdale mendirikan toko kecil karena tidak tahan menjadi korban Revolusi Industri. Di Jerman, Raiffeisen membangun koperasi kredit agar petani terbebas dari lintah darat. Dan di Indonesia, Wiriaatmaja juga Hatta

menjadikannya wadah perjuangan martabat manusia.

Di setiap tempat, rumah tua ini punya kisahnya sendiri, tetapi fondasinya selalu sama. Solidaritas.

Namun zaman berputar cepat. Kapitalisme datang dengan wajah yang berkilau dan janji yang manis. Banyak yang meninggalkan rumah tua itu. Ada yang menukar semangatnya dengan proyek, ada yang memaku papan namanya hanya demi proposal. Tapi di banyak sudut desa dan kota kecil, masih ada orang-orang yang setia menyalakan lampunya. Petani, nelayan, pedagang kecil, juga anak-anak muda yang percaya bahwa keadilan sosial tidak perlu menunggu negara datang.

Kumpulan esai ini adalah perjalanan untuk menelusuri kembali rumah tua itu. Dari toko kecil di Rochdale hingga stadion megah di Spanyol. Dari Bank Pertolongan di Purwokerto hingga koperasi digital di abad dua puluh satu. Kisah-kisah ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi tentang manusia, tentang cara mereka bertahan, berbagi, dan bermimpi dalam dunia yang sering melupakan arti kebersamaan.

Sebab koperasi, pada hakikatnya, adalah demokrasi dalam bentuk yang paling sunyi. Satu anggota, satu suara. Ia menolak keserakahan tanpa slogan, menegakkan keadilan tanpa perlu panggung. Ia adalah ekonomi yang berdenyut di pasar kecil, di sawah, di lumbung, di layar gawai. Ia bukan sekadar sistem, tetapi cara hidup.

Rumah tua ini mungkin tak semegah istana korporasi, tetapi di dalamnya manusia masih bisa

memanggil satu sama lain dengan nama, bukan dengan nomor rekening. Ia tetap tegak karena dijaga oleh nilai-nilai lama yang tak lekang, kejujuran, solidaritas, tanggung jawab, dan cinta pada sesama.

Dan barangkali, dalam dunia yang terus mencari arah di tengah badai modernitas, rumah tua inilah satu-satunya tempat pulang. Tempat di mana kita bisa percaya kembali bahwa ekonomi tak harus kejam, dan kemajuan tak harus meninggalkan nurani.

Sebab di ambang pintu rumah itu masih tergantung tulisan sederhana, pudar dimakan waktu, tapi tetap terbaca jelas, “Sendiri kita rapuh, bersama kita kuat.”

Dalam pengantar ini, kita diajak menilik koperasi dari berbagai sisi. Sejarah panjangnya, moral yang membangun, dilema modernisasi, hingga kebijakan besar seperti Koperasi Merah Putih.

Kita akan menyaksikan koperasi sebagai laboratorium kemanusiaan, jantung ekonomi desa, sekaligus ruang hidup sosial di tengah gelombang globalisasi dan disrupsi digital.

Mari kita tengok kembali rumah tua ini. Bukan untuk meratapi puing-puingnya. Tetapi untuk membangunnya kembali, dengan pondasi moral yang kokoh, gotong royong yang hidup, dan inovasi yang melayani tanpa meniadakan manusia.

Selamat membaca.

Bagian I
Akar dan Jejak Sejarah

Dari Toko Kecil
Hingga Stadion Raksasa

Orang sering mengira koperasi lahir dari seminar panjang, dari diskusi di hotel berbintang, atau dari rapat maraton yang penuh jargon ekonomi. Nyatanya tidak. Koperasi lahir dari perut yang lapar. Dari kantong yang bolong. Dari rakyat kecil yang ditindas harga barang dan ulah pedagang serakah.

Sejarah mencatat, di Inggris abad ke-19, buruh tekstil yang hidupnya lebih lusuh daripada kain yang mereka jahit, akhirnya bosan menjadi sapi perah Revolusi Industri. Mereka lalu mendirikan toko bersama. Tahun 1844, lahirlah *Rochdale Society of Equitable Pioneers*.

Dalam *The History of Co-operation* (1875), George Jacob Holyoake menulis bahwa para perintis Rochdale “bukan sedang merancang teori ekonomi, melainkan sedang menyelamatkan perut mereka.” Dari toko kecil itulah dunia mengenal koperasi modern.

Apa yang mereka jual? Bukan janji, melainkan kebutuhan dasar seperti tepung, gula, lilin, dan sabun. Aturan mereka sederhana. Jujur, adil,

jangan tipu timbangan. Di tengah dunia perdagangan yang sarat penipuan, prinsip sesederhana itu terasa seperti revolusi. Dan tampaknya, para buruh miskin itu lebih visioner daripada banyak pejabat masa kini. Mereka tahu, tanpa solidaritas, mereka hanya akan menjadi bahan bakar mesin kapitalisme.

Rochdale kemudian merumuskan prinsip koperasi yaitu keanggotaan terbuka, satu orang satu suara, pembagian surplus sesuai kontribusi, dan yang paling revolusioner di antara semuanya adalah pendidikan anggota. Sebab tanpa pendidikan, koperasi hanya akan menjadi kelompok bermain.

Tak lama kemudian, di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen memiliki gagasan serupa namun dalam ladang berbeda. Melihat petani dicekik lintah darat, ia mendirikan koperasi kredit.

Dalam bukunya *The Credit Unions* (1866), Raiffeisen menulis filosofinya singkat saja, *self-help*, *self-governance*, *self-responsibility*. Dalam bahasa kita, “jangan kebanyakan mengeluh, ayo patungan.” Dengan uang kolektif, petani bisa lepas dari jerat rentenir. Sistem ini jauh lebih waras daripada bank modern yang gemar memberi pinjaman kepada konglomerat tapi menutup pintu bagi rakyat jelata.

Prinsip-prinsip itu kemudian dibakukan oleh *International Co-operative Alliance* (ICA) dalam *Statement on the Co-operative Identity* (1995), yang dikenal sebagai *Seven Cooperative Principles*, yaitu keanggotaan sukarela, kendali demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi,

pendidikan, kerja sama antar-koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Tujuh pilar ini menjadi semacam kitab suci gerakan koperasi dunia.

Di luar negeri, koperasi tumbuh menjadi raksasa tanpa kehilangan jiwanya. Di Jepang, koperasi pertanian menjadi tulang punggung distribusi pangan nasional. Di Kanada dan Amerika Serikat, *credit union* menjadi penyedia layanan keuangan jutaan orang (*Credit Union National Association, Annual Report* 2022). Di Eropa, koperasi perumahan, energi terbarukan, hingga ritel raksasa tumbuh besar tanpa meninggalkan prinsip demokrasi anggota.

Di Skandinavia, koperasi bahkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Contohnya, konglomerat ritel *Coop Norden* yang kini terpecah menjadi *Coop Sverige*, *Coop Norge*, dan lainnya, yang dimiliki oleh jutaan anggota konsumen di seluruh kawasan (ICA, *World Co-operative Monitor* 2023).

Di sektor energi, koperasi seperti *Middelgrunden Wind Turbine Co-operative* di Kopenhagen menjadi pelopor transisi listrik hijau. Dengan model kepemilikan warga, mereka membuktikan bahwa energi bersih bisa lahir dari solidaritas lokal (Krohn & Dethlefsen, 2007; Toke, 2011; Danish Energy Agency, 2018).

Tak hanya di darat, di laut pun prinsip serupa hidup. *Norges Råfisklag* di Norwegia, koperasi nelayan yang mengatur penjualan pertama hasil tangkapan, menjamin harga dan kualitas bagi

anggotanya di bawah regulasi yang ketat (*Norwegian Directorate of Fisheries*). Semua ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi profesional sekaligus demokratis, tidak terjebak pada dilema “antara rakyat kecil atau korporasi besar.” Mereka bisa jadi keduanya.

Dan di sinilah kisahnya menjadi menarik. Koperasi tidak hanya bisa hidup di pasar pangan, energi, dan perikanan, tetapi menyeberang ke dunia lain. Dunia sepak bola?

Ya, sepak bola. Agama ketiga umat manusia setelah nasi. Di Spanyol, klub-klub besar seperti Real Madrid dan Barcelona dimiliki oleh *socios*, para anggota yang membayar iuran tahunan. Mereka bukan sekadar penonton, tapi pemilik klub. Setiap socios punya hak suara, bisa memilih presiden klub, bahkan ikut menentukan arah kebijakan. Presiden klub tidak dipilih oleh investor, melainkan oleh ribuan anggota.

Secara teori, inilah bentuk ideal dari *football by the people, for the people*. Seakan-akan Rochdale pindah ke *Camp Nou*. Demokrasi sepak bola, gotong royong di stadion.

Namun, seperti halnya demokrasi di dunia nyata, demokrasi di stadion juga penuh drama. Para calon presiden klub berkampanye seperti politisi. Janji membeli pemain bintang, janji membangun stadion megah, janji tiket murah, janji kejayaan. Janji-janji itu kadang lebih muluk daripada visi-misi caleg. Bedanya, kalau rakyat sering lupa janji lima tahun lalu, socios bisa lebih galak. Salah sedikit, *vote of no confidence* langsung digelar.

Kasus Josep Maria Bartomeu di Barcelona menjadi contoh nyata. Ia terpilih dengan janji kejayaan, tapi terjerat skandal keuangan. *El País* (2020) melaporkan, kasus “Barçagate” bahkan membuat polisi turun tangan. Socios marah, mengumpulkan tanda tangan untuk mosi tidak percaya. Bartomeu akhirnya mundur sebelum dipermalukan di pemungutan suara.

Setelah itu, Joan Laporta naik kembali. *The Guardian* (2021) menulis bahwa Laporta menjual harapan baru. Menyelamatkan finansial klub dan mengembalikan kejayaan. Para socios memilihnya karena mereka lapar akan perubahan. Ceritanya mirip sekali dengan setiap kali pilkada datang penuh janji, penuh harapan, penuh drama.

Apa bedanya koperasi dengan socios? Tidak banyak, kecuali barang dagangannya. Koperasi menjual beras dan pinjaman kecil, socios menjual tiket dan mimpi juara *Liga Champions*. Keduanya sama-sama berbasis anggota, sama-sama menjunjung kepemilikan bersama, sama-sama demokratis di atas kertas. Dan keduanya pun punya cacat bawaan. Koperasi bisa disusupi kepentingan politik local, socios bisa dipolitisasi oleh isu identitas dan nasionalisme, apalagi di Catalonia, tempat Barcelona menjadi simbol perlawanan budaya. Koperasi bisa berubah menjadi alat segelintir pengurus. Socios bisa menjadi panggung kampanye pribadi. Pada akhirnya, idealisme bisa runtuh di hadapan pragmatisme.

Namun meski penuh retakan, koperasi dan socios tetap relevan. Di tengah dunia yang dikuasai modal besar, mereka adalah alternatif, cara rakyat biasa mempertahankan kendali atas nasibnya. Mereka membuktikan bahwa demokrasi bisa hidup, bahkan di ruang-ruang yang tidak biasa, di warung kecil dan di stadion sepak bola.

Sejarah koperasi mengajarkan kita bahwa solidaritas lahir bukan dari pidato, melainkan dari kebutuhan. Rochdale membangun toko karena lapar. Raiffeisen membentuk koperasi kredit karena petani dicekik. Hatta mendorong koperasi agar rakyat berdiri di atas kaki sendiri. Dan socios di Spanyol menjaga agar sepak bola tetap milik rakyat, bukan oligarki.

Namun sejarah juga mengingatkan, tiada gading yang tak retak. Demokrasi bisa dimanipulasi,

solidaritas bisa direduksi jadi alat politik. Koperasi bisa tinggal papan nama, socios bisa berubah jadi sandiwara.

Karena itu, baik di pasar maupun di stadion, yang paling dibutuhkan bukan sekadar aturan, tapi integritas. Tanpa itu, koperasi hanya menjadi koperasi simpan janji, pinjam kecewa. Dan socios hanya menjadi penonton dalam drama kekuasaan klub.

Tetapi selalu ada harapan. Sebab seperti kata pepatah Inggris, "*Alone we are weak, together we are strong*." Sendiri kita lapar, bersama kita bisa buka toko. Bahkan bisa punya klub bola.

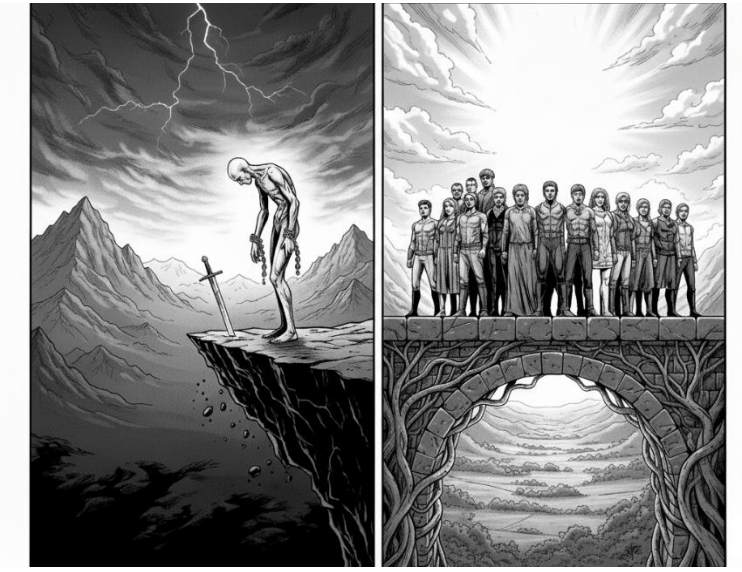

Jejak Panjang Koperasi di Tanah Air

Koperasi, sebuah kata yang kadang terdengar seperti siaran radio AM di era *Spotify*. Tua, sederhana, namun tetap bertahan.

Jika di Inggris koperasi lahir dari toko kecil para buruh pemintal di Rochdale yang jengah dijadikan mesin Revolusi Industri, dan di Jerman tumbuh dari semangat solidaritas desa agraris yang digerakkan Raiffeisen yang tak tega melihat warganya tercekik rentenir, maka di Nusantara kisahnya nyaris serupa. Koperasi muncul bukan dari teori, melainkan dari keterdesakan hidup. Ia lahir untuk membantu para pegawai negeri pribumi yang kesulitan keuangan dengan memberi pinjaman tanpa bunga.

Di tanah jajahan yang diatur dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang kejam, gagasan koperasi muncul bukan sebagai wacana akademik, melainkan sebagai bentuk perlawanan senyap terhadap penindasan. Ia tidak lahir dari ruang seminar kaum terdidik, melainkan dari penderitaan rakyat yang ingin lepas dari jerat lintah darat dan

sistem kolonial yang tak berperikemanusiaan. Dari sinilah akar koperasi Indonesia tumbuh. Bukan dari teori ekonomi. Melainkan dari naluri kemanusiaan dan semangat untuk hidup bermartabat.

Kini, setelah lebih dari satu abad berkelindan dengan perubahan, koperasi tidak lagi sekadar kisah masa lalu. Ia telah menjadi cermin perjalanan bangsa, antara daya tahan dan harapan, antara sejarah dan masa kini.

Belakangan, kata “koperasi” kembali ramai dibicarakan di forum-forum kebijakan, di media sosial, bahkan di warung kopi. Ibarat rumah tua yang sempat ditinggalkan, kini rumah itu hendak direnovasi. Ada yang yakin fondasinya masih kokoh dan layak dijadikan menara harapan bagi ekonomi desa, ada pula yang ragu, jangan-jangan renovasi itu hanya mengecat dinding yang retak tanpa memperbaiki tiangnya yang lapuk.

Padahal koperasi bukan sekadar bangunan ekonomi. Ia adalah rumah gagasan, tempat rakyat dulu menambatkan harapan tanpa harus berteriak di panggung politik. Kini, rumah itu sedang dihidupkan kembali dalam wajah modern, dengan logo baru, aplikasi digital, dan bahkan akun TikTok. Namun, apakah jiwanya ikut diperbarui?

Perjalanan koperasi Indonesia berawal pada tahun 1886 di Purwokerto, ketika Patih Raden Aria Wiriaatmaja mendirikan *Hulp en Spaarbank* (Bank Pertolongan dan Tabungan) bagi para pegawai negeri pribumi (Sukamdani 1980). Langkah kecil itu menjadi cikal bakal gerakan koperasi di

Indonesia. Tujuannya sederhana, menyelamatkan martabat manusia dari jeratan bunga mencekik.

Wiriaatmaja meniru sistem kredit ala Raiffeisen di Jerman, tetapi menanamkan nilai tolong-menolong yang telah lama hidup dalam budaya lokal. Dari sinilah kesadaran baru tumbuh. Bahwa ekonomi bisa diatur tanpa menindas, dan kesejahteraan bisa dibangun tanpa bergantung pada kemurahan hati penguasa.

Dua dekade kemudian, Dr. Soetomo bersama organisasi Budi Utomo melihat koperasi sebagai alat perjuangan sosial, sarana rakyat untuk memperbaiki kesejahteraan tanpa tunduk pada sistem kolonial (Hatta 1951). Sejak itu, koperasi melampaui fungsi ekonominya dan menjadi wadah pembentukan karakter bangsa, tempat rakyat belajar demokrasi, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.

Namun semangat itu segera terbentur pada tembok kekuasaan. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Verordening Op De Coöperatieve Vereeniging* tahun 1915, peraturan yang di atas kertas tampak memberi izin, tetapi sejatinya membelenggu. Bahasa Belanda diwajibkan dalam akta, kemudian notaris harus disahkan oleh pemerintah kolonial, dan seluruh kegiatan diawasi ketat (Soetrisno 2002). Koperasi pribumi ibarat benih yang tumbuh di tanah kering. Hidup, tetapi tercekik.

Pendudukan Jepang membawa babak yang lebih kelam. Koperasi dijadikan alat mobilisasi perang dengan nama *Kumiai*. Gotong royong yang dulu

menjadi sumber kekuatan rakyat berubah menjadi instrumen propaganda militer. Dari pengalaman pahit itu, rakyat belajar satu hal penting bahwa, koperasi sejati tidak bisa hidup di bawah tekanan. Ia hanya tumbuh bila berakar pada kebebasan, kesetaraan, dan kepercayaan (Suyono 1985).

Ketika Republik Indonesia berdiri, semangat koperasi kembali menyala. Dua tahun setelah proklamasi, Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 melahirkan SOKRI - Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia - dan menetapkan tanggal itu sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejak saat itu, koperasi menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat.

Enam tahun kemudian, dalam Kongres Koperasi Kedua (1953) di Bandung, Mohammad Hatta dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam pidatonya, Hatta menegaskan, “Koperasi bukan hanya soal keuntungan, tetapi soal kemanusiaan yang mengutamakan kerja sama di atas persaingan.” (Hatta 1951, 42). Pandangan itu meneguhkan posisi koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi Indonesia, konsep yang menempatkan manusia, bukan modal, di pusat pembangunan.

Nilai koperasi Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari tradisi gotong royong yang berurat akar dalam budaya Nusantara. Dari *mapalus* di Minahasa, *subak* di Bali, *arisan* di Jawa, *nahe bibit* di Timor. Semuanya berbicara tentang kerja bersama dan tanggung jawab sosial.

Bagi Hatta, gotong royong adalah “sumber moral ekonomi bangsa,” karena di sanalah tumbuh semangat saling menolong dan solidaritas sosial. Koperasi, dalam pandangan Hatta, adalah bentuk modern dari nilai-nilai lama yang bertransformasi menjadi demokrasi ekonomi (Hatta 1951, 57).

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Rochdale Pioneers tahun 1844 di Inggris yang merumuskan tujuh prinsip koperasi, keanggotaan sukarela dan terbuka, kendali demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi, pendidikan, kerja sama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas (Birchall 1997). Nilai-nilai itu mungkin lahir di Eropa, tetapi jiwanya menemukan gema paling dalam di Indonesia, karena gotong royong telah lebih dahulu menanamkan esensi yang sama.

Kini, koperasi menghadapi tantangan baru yakni digitalisasi, globalisasi, dan budaya instan. Namun, jika akar moralnya tetap kuat, koperasi akan selalu menjadi ruang alternatif bagi ekonomi yang hanya mengejar laba. Koperasi digital, *platform cooperative*, dan *green cooperative* hanyalah wajah baru dari semangat lama yang beradaptasi dengan zaman. Nilainya tetap sama yaitu kejujuran, solidaritas, tanggung jawab, kesetaraan, dan kepedulian sosial.

Koperasi adalah demokrasi yang bekerja di tanah kehidupan sehari-hari, tempat di mana ekonomi menjadi sarana, dan manusia tetap menjadi tujuan. Rumah tua ini memang perlu direnovasi, karena fondasinya masih kokoh berdiri di atas dua batu tungku, yaitu gotong royong dan kemanusiaan.

Di Indonesia, koperasi punya bapak bernama Mohammad Hatta, sang proklamator yang dalam pidatonya di Hari Koperasi Nasional 12 Juli 1951 dengan tegas menyebut, “Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa.”

Ironisnya, gerakan yang lahir dari kantong bolong ini justru sering terjebak dalam mentalitas proyek. Banyak koperasi di Indonesia lebih mirip usaha “percetakan proposal” ketimbang gerakan ekonomi rakyat. Banyak di antaranya lahir bukan karena keinginan anggota untuk berdaya, melainkan karena adanya bantuan dana bergulir dari kementerian. Begitu dana habis, koperasi pun bubar.

Kalau Hatta masih hidup, mungkin beliau akan tersenyum getir dan berkata: “Kupikir kalian mendirikan koperasi simpan pinjam, ternyata simpan proposal, pinjam anggaran.”

Inilah ironi paling getir. Di negeri gotong royong ini, koperasi kalah pamor dengan pinjaman online. Pinjol lebih cepat, lebih lincah, meski bunganya mencekik. Akibatnya, rakyat lebih percaya pada aplikasi asing ketimbang koperasi yang seharusnya menjadi sokoguru ekonomi bangsa.

Padahal, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, koperasi bisa menjadi penyeimbang kapitalisme. Dalam teori ekonomi, koperasi adalah “ekonomi berbasis manusia,” berbeda dari korporasi kapitalis yang berbasis modal. Satu anggota, satu suara, bukan satu saham, satu suara.

Dalam koperasi, direktur bukan penguasa, melainkan pelayan anggota. Namun dalam praktik, sering kali yang terjadi justru sebaliknya, anggota menjadi pelayan segelintir pengurus. Prinsip demokrasi ekonomi yang indah itu sering kali hanya menjadi angin surga. Di atas kertas semua anggota setara, namun di lapangan suara bisa dibeli, dan jabatan diwariskan seperti kursi kerajaan.

Koperasi Jalan Alternatif

Di tengah arus deras kapitalisme pasar yang rakus dan negara yang sering kali terlalu paternalistik, koperasi kerap dipandang sebelah mata.

Dalam kacamata ekonomi arus utama, koperasi sering dianggap “tidak efisien” atau “hibrida yang canggung.” Ia tidak sepenuhnya milik pasar, dan tidak pula sepenuhnya milik negara. Ia hidup di ruang abu-abu yang jarang dipahami. Sebuah wilayah perbatasan antara logika keuntungan dan nilai kemanusiaan. Di sanalah koperasi meneguhkan dirinya, bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi sebagai pernyataan moral bahwa kesejahteraan bersama masih mungkin diperjuangkan di tengah dunia yang kian individualistik.

Namun, sejarah membuktikan bahwa koperasi bukanlah sekadar kenangan indah atau retorika Bung Hatta yang diulang-ulang. Ketika pasar gagal menciptakan keadilan dan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal, kemudian negara terlalu birokratis dalam menyalurkan bantuan, sehingga rakyat lebih sering berhadapan dengan formulir ketimbang

solusi, maka koperasi hadir sebagai bentuk solidaritas ekonomi.

Koperasi adalah jalan alternatif yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat, yang ingin bertahan hidup dengan bermartabat. Ia bukan sekadar teori, melainkan praktik gotong royong yang menolak tunduk sepenuhnya pada logika untung-rugi dan belas kasih negara.

Ini sejalan dengan pola pikir ekonom humanis, yang menempatkan kemanusiaan sebagai muatan ekonomi modern. Dalam karyanya *Humanizing the Economy*, John Restakis melontarkan kritik mendasar terhadap sistem ekonomi kontemporer.

Ia berpendapat bahwa obsesi terhadap pertumbuhan di era modern telah mereduksi ekonomi menjadi metrik kuantitatif semata, sekadar angka statistik yang terpampang di layar presentasi, sehingga mengabaikan dimensi moral dan sosialnya (Restakis, 2010, hlm. 15–20).

Kritik ini berfungsi sebagai penegasan kembali esensi fundamental, bahwa ekonomi sejatinya harus berpusat pada kemanusiaan. Yaitu tentang keadilan, martabat, dan rasa memiliki.

Kritik ini selaras dengan argumen E.F. Schumacher, yang sejak lama menuntut ekonomi berskala kemanusiaan (*human-scale economics*) sebagai penolakan terhadap obsesi pertumbuhan yang destruktif (Schumacher, 1973, hlm. 50–55). Esensi fundamentalnya jelas, ekonomi sejatinya harus berpusat pada keadilan, martabat, dan rasa memiliki.

Secara akademis, kritik ini juga diperkuat oleh Amartya Sen, yang melalui pendekatan kapabilitas-nya, mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak seharusnya diukur dari statistik PDB. Melainkan dari kebebasan dan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang bermartabat (Sen, 1999, hlm. 70–75).

Dalam bingkai pemikiran inilah, pernyataan Restakis menjadi landasan filosofis yang kokoh untuk memahami koperasi. Koperasi, oleh karena itu, muncul sebagai model ekonomi alternatif. Ia adalah gerakan transformatif dan aksi langsung untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara konkret.

Koperasi mewujudkan jalan nyata untuk mengembalikan kendali ekonomi ke tangan warga, yang secara inheren memastikan bahwa fokus utama tetap pada nilai kemanusiaan, bukan semata-mata pada akumulasi modal.

Pandangan ini secara tegas didukung oleh Elinor Ostrom, yang melalui penelitian ekstensifnya tentang tata kelola sumber daya bersama, menyimpulkan bahwa komunitas lokal sering kali berhasil menciptakan dan menegakkan aturan kolektif yang berkelanjutan, menolak solusi tunggal berupa privatisasi pasar atau sentralisasi negara (Ostrom 1990, hlm. 89–102). Ostrom menunjukkan bahwa masyarakat mampu melakukan "tindakan kolektif" yang rasional untuk mengatasi dilema sumber daya secara efektif.

Dengan mengutamakan martabat dan rasa memiliki melalui prinsip-prinsip demokratis, koperasi adalah jawaban yang praktis dan relevan untuk "memanusiakan kembali ekonomi." Ia adalah institusi yang mampu menolak dominasi dan mengembalikan kendali ke tangan komunal.

Kita pun tahu, liberalisme ekonomi dalam praktiknya bukan membawa kebebasan, melainkan menciptakan jurang. Thomas Piketty menunjukkan bagaimana konsentrasi kekayaan global saat ini hampir menyerupai era feodalisme. Lima belas orang terkaya di dunia misalnya, kekayaannya bisa menyamai ratusan juta penduduk miskin (Piketty 2014, hlm. 430–435). Jika hal ini dibiarkan, maka “pasar bebas” bisa berubah menjadi pasar liar.

Di sinilah koperasi menawarkan koreksi. Ia adalah alternatif yang mendistribusikan nilai, bukan hanya mengakumulasi modal.

Koperasi menolak logika “yang kuat semakin kuat” dengan memberi ruang agar yang lemah bisa bertahan, bahkan berkembang. Koperasi mungkin tidak bisa menjanjikan pertumbuhan setinggi *unicorn startup*. Tetapi ia bisa menjanjikan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu rasa adil dan kebersamaan.

Namun ironisnya, di Indonesia, jalan alternatif ini sering kali macet dan kerdil. Koperasi kerap dipersempit menjadi sekadar “unit usaha desa.” Ia ditumpangi birokrasi, dibebani slogan, dan dibiarkan berjalan seadanya.

Banyak koperasi hanya hidup di atas kertas, sementara dalam keseharian ia tidak lagi memberi arti bagi anggotanya. Koperasi seakan terjebak dalam nostalgia 12 Juli, Hari Koperasi Nasional, tanpa pernah sungguh-sungguh diajak masuk ke abad ke-21.

Padahal, koperasi tidak seharusnya terperangkap dalam warisan yang mengerdilkan itu. Ia harus menjadi koperasi yang berani. Berani modern. Berani transparan. Berani mendengarkan anggotanya. Sebab, keberanian adalah inti dari transformasi. Koperasi yang sehat tidak takut pada audit. Tidak gentar disorot publik. Dan tidak alergi kritik. Sebaliknya, ia menjadikan keterbukaan sebagai sumber kepercayaan.

Karena pada akhirnya, yang kita bangun bukan hanya koperasi yang berbisnis, tetapi koperasi

yang benar-benar bermanfaat. Sebuah koperasi yang bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan ruang sosial di mana manusia bisa tetap menjadi manusia. Bekerja, berunding, untung, dan gotong royong.

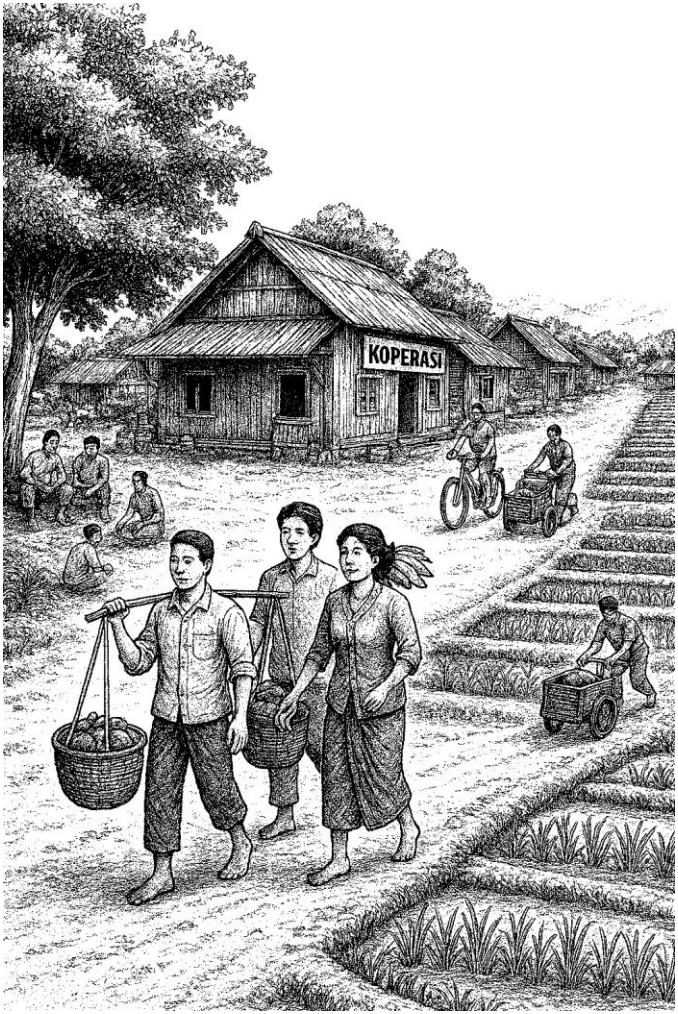

Gotong Royong yang Lupa Jalan Pulang

Menengok kembali akar filosofis koperasi ibarat membuka denah rumah tua sebelum direnovasi. Tujuannya bukan semata memperindah tampilan luar, melainkan memahami bagian mana yang mulai keropos dan mana yang masih kokoh untuk dijadikan penopang. Sebab, jika hanya mengecat dinding tanpa memeriksa tiang penyangga, rumah itu tinggal menunggu waktu untuk ambruk.

Koperasi, kata Bung Hatta, adalah sokoguru perekonomian bangsa. Namun, coba tanyakan pada generasi Z hari ini. Mereka mungkin lebih akrab dengan “Soko Guru” sebagai nama kafe instagramable di Jogja ketimbang sebagai prinsip ekonomi kerakyatan.

Ironis? Tentu saja. Tapi begitulah nasib koperasi setelah puluhan tahun didandani seperti institusi formal. Rapi di luar, hampa di dalam. Lebih banyak rapat daripada mufakat.

Padahal, koperasi tidak lahir dari *spreadsheet* atau proposal tiga rangkap. Ia lahir dari krisis, dari kebutuhan rakyat untuk bertahan hidup bersama,

ditopang oleh fondasi budaya yang kuat yaitu, gotong royong.

Koentjaraningrat mendefinisikan gotong royong, sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan (Koentjaraningrat, 1974: 60).

Konsep ini menegaskan bahwa gotong royong adalah sistem pengarahan daya kolektif demi kepentingan bersama, bukan kepentingan sepihak.

Dalam konteks koperasi, pengerahan tenaga tanpa bayaran ini bertransformasi. Bentuknya adalah partisipasi aktif modal (simpanan), partisipasi usaha (produksi atau distribusi), dan partisipasi pengambilan keputusan melalui rapat anggota.

Semua bentuk partisipasi ini harus dilakukan atas dasar kesukarelaan dan asas timbal balik. Tujuannya tunggal yaitu, membangun kemakmuran bersama. Inilah seharusnya inti dari gerakan koperasi.

Dulu, gotong royong tak butuh MoU, cukup niat baik dan tanggung jawab moral. Kini, semua harus ada stempel basah, tanda tangan pengurus, dan sering kali… ditambah materai. Gotong royong akhirnya pindah alamat dari semangat ke prosedur.

Formalitas prosedur ini yang kemudian mengerdilkan fungsinya. Kita pun lupa bahwa koperasi bukan tempat untuk elit desa membagi

proyek atau mencetak kalender tahunan. Ia adalah alat perjuangan rakyat menghadapi ketimpangan.

Namun pelan-pelan, fungsinya menyempit, menjadi koperasi simpan pinjam semata. Dan ironisnya lebih rajin meminjam ke luar, ketimbang menumbuhkan kekuatan dari dalam.

Pesona koperasi meredup bukan karena konsep dasarnya keliru. Justru prinsip-prinsipnya yaitu, gotong royong, solidaritas, dan kemandirian ekonomi, semakin relevan hari ini.

Masalahnya, banyak koperasi kehilangan marwah bukan karena ideologinya usang, tapi karena strukturnya yang membeku. Koperasi berjalan seperti mesin tua, lambat merespons perubahan, penuh prosedur, dan tidak ramah bagi anggota muda yang terbiasa pada akses cepat serta layanan instan.

Ironisnya lagi, koperasi malah terasa seperti birokrasi mini yang kaku dan membatu. Selain struktur yang kaku, budaya internal juga turut mengekang. Pengurusnya sering itu-itu saja. Minim regenerasi, minim partisipasi. Terlalu nyaman dengan *status quo*.

Akibatnya, koperasi berubah menjadi klub tertutup, bukan ruang terbuka bagi kolaborasi rakyat. Tak heran bila anak muda enggan terlibat. Mereka melihat koperasi sebagai sesuatu yang kuno. Lamban, dan kehilangan vitalitas.

Lalu, muncul pertanyaan. Apakah koperasi yang kehilangan arah, atau justru kita sendiri yang lupa

jalan pulang? Kegagalan internal ini membuat koperasi rentan terhadap eksploitasi eksternal.

Dulu, koperasi lahir sebagai alat perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan. Kini, tak sedikit yang menjelma sekadar pelengkap proyek pemerintah. Atau lebih ironis lagi, menjadi kendaraan politik musiman. Dibuka gegap gempita saat kampanye, lalu ditinggalkan begitu pemilu usai. Esensinya menguap, tinggal nama.

Maka, ketika kita bertanya apakah koperasi masih relevan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat? Jawabannya bergantung.

Tergantung apakah kita mau membongkar ulang penyangganya. Menyegarkan semangatnya. Menyadarkan kembali bahwa koperasi bukan soal rapat, tapi soal gerakan. Bukan sekadar aplikasi digital, tapi sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Sebab jika tidak, koperasi hanya akan jadi etalase kosong. Indah di laporan, megah di baliho. Tapi sunyi di pasar, tempat di mana denyut ekonomi rakyat seharusnya terdengar paling keras.

Karena itu, koperasi harus kembali menjadi nafas kehidupan, bukan sekadar struktur administratif yang sibuk mencatat tapi lupa berjuang. Hanya dengan begitu, ia bisa kembali menjalankan tugas utamanya, menjadi rumah besar tempat rakyat bernaung, berdaya dan bergerak bersama.

Legenda Dua Laci

Di banyak tempat, koperasi sering diringkas dalam satu mitos sederhana, yaitu hanya soal dua laci. Satu untuk menyimpan uang anggota, satu lagi untuk meminjamkannya kembali. Selesai. Sesederhana itu?

Ironisnya, banyak koperasi memang terjebak dalam reduksi sempit ini. Tabungan jadi sekadar formalitas, pinjaman jadi rutinitas. Lama-kelamaan, dua laci itu kosong. Tabungan menguap, pinjaman macet, dan yang tersisa hanyalah tumpukan berkas serta papan nama lapuk dekat balai desa.

Rapat anggota tahunan pun tak lebih dari ritual tahunan tanpa roh. Seusai rapat, anggota pulang dengan nasi kotak kecil, sambil membawa harapan besar. Celakanya, nasinya cepat basi, sementara harapannya tak pernah jadi kenyataan. Tahun berganti, kotak nasi hilang, harapan apalagi.

Kekosongan ini berakar pada hilangnya visi dan imajinasi. Legenda dua laci membuat koperasi miskin horizon, seolah fungsi utamanya hanyalah memberikan pinjaman untuk beli pupuk atau bayar

sekolah anak. Tentu ini tidak salah. Tapi jelas tidak cukup.

Koperasi seharusnya bukan rumah satu pintu, apalagi hanya dua laci. Ia mestinya rumah multi-pintu: ada pintu produksi, distribusi, edukasi, digital, hingga inovasi sosial. Sayangnya, pintu-pintu itu kerap terkunci rapat, seakan kuncinya ikut dibuang bersama risalah rapat yang tak pernah dibaca ulang.

Kesadaran akan stagnasi ini bukan hanya dirasakan anggota, tetapi juga negara. Pemerintah berulang kali mencoba membuka pintu-pintu baru bagi koperasi. Reformasi regulasi dilakukan, agar koperasi tak lagi terkurung dalam mitos “dua laci.”

Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 misalnya, koperasi diberi akses ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga Rp15 miliar. Aturan ini membuka peluang koperasi bertransformasi menjadi penyedia barang dan jasa bagi proyek publik, bukan sekadar kasir pinjaman.

Lebih jauh lagi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, koperasi bahkan diberi wewenang mengelola tambang mineral dan batubara (Minerba) dalam skala terbatas, maksimal 2.500 hektare. Sebuah langkah ambisius yang mengisyaratkan bahwa koperasi bisa menjadi agen pembangunan daerah, mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan anggota.

Namun pertanyaan besarnya tetap menganga. Mengapa koperasi tak bisa menjadi inkubator bisnis lokal? Mengapa tidak tumbuh sebagai hub digital bagi petani, nelayan, dan UMKM? Mengapa ia berhenti sebatas “mesin fotokopi bantuan pemerintah,” tanpa pernah beranjak menjadi mesin pencipta peluang?

Ketiadaan visi ekonomi yang kuat membuat koperasi rentan terhadap salah urus, bahkan eksploitasi.

Lebih pahit lagi, koperasi kerap diperlakukan sebagai kendaraan politik lokal. Logo dan slogan kerakyatan terpampang besar, tetapi praktik di dalamnya sering tak lebih dari yayasan pribadi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Laporan keuangan dibacakan sekilas, tanpa ruang untuk ditelaah. Forum anggota sekadar formalitas, dihadiri mereka yang sudah akrab dengan pengurus. Lalu di mana letak transparansinya? Apa partisipasi benar-benar hidup di sana, atau sekadar nama indah yang dipajang di papan pengumuman?

Kritik ini bukan sebatas tudingan tanpa dasar. Sejarah koperasi di Indonesia telah mencatat betapa rapuhnya sebuah organisasi ketika dikelola tanpa prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Contoh kegagalan akibat salah kelola bukanlah fiksi. Di Depok, kasus KSP Pandawa Mandiri Group menjadi pelajaran mahal: skema ponzi berkedok investasi menjerat ribuan anggota dan menyebabkan kerugian besar (Gani, *Tempo*, 2017).

Di Inggris, *Co-op Bank* bahkan harus menerima bailout karena kesalahan manajemen dan lemahnya fungsi pengawasan (*The Guardian*, 2013). Sementara di Kanada, pengalaman *Credit Union Central* pada 1980-an menunjukkan bagaimana kebijakan investasi yang terlalu agresif dan pengawasan longgar bisa menjerumuskan koperasi kredit ke jurang kehancuran (Croteau, 2018).

Kasus-kasus ini menegaskan bahwa mitos “dua laci” sering menutupi risiko moral dan kelemahan tata kelola yang berujung fatal, baik di level lokal maupun global.

Padahal, bila kita mau jujur, koperasi punya potensi besar untuk menjadi alternatif nyata melawan sistem kapitalistik yang kian tak terkendali. Tapi selama ia terkungkung dalam mitos “dua laci,” koperasi tak lebih dari warung kopi yang menunya tak pernah berubah, terlihat sama, rasanya hambar, dan lama-lama ditinggalkan pelanggan.

Mungkin sudah waktunya koperasi membuka laci ketiga. Sebuah ruang bagi inovasi, pemberdayaan, dan diversifikasi usaha. Laci yang tak hanya menyimpan uang, tetapi juga menyimpan ide, semangat, dan keberanian untuk berubah.

Pertanyaannya kini, apakah kita akan terus puas hidup dengan koperasi dua laci, atau berani membuka laci ketiga, sebelum ia terkubur bersama debu arsip dan papan namanya yang lapuk?

Bagian II
Krisis dan Kritik

Aplikasi yang Tak Pernah Diunduh

Mari kita bicara soal tantangan paling pelik dalam transformasi koperasi hari ini. Digitalisasi. Bukan pada teknologi, tapi pada mentalitas. Bukan pada aplikasi, tapi pada budaya organisasi.

Digitalisasi koperasi sering diperlakukan seperti slogan kampanye. Ditulis dengan huruf besar semua. Penuh janji dan harapan. Ada seminar bertema koperasi digital 4.0. Ada *banner* berwarna futuristik dengan gambar jaringan internet dan ikon *cloud*.

Tetapi, berapa banyak koperasi yang benar-benar mencatat transaksi lewat aplikasi? Berapa banyak yang mendata anggotanya secara daring? Berapa banyak yang berani menggelar rapat anggota *via zoom*, tanpa harus menunggu semua orang hadir di balai desa?

Di banyak tempat, koperasi digital masih sebatas *brosur* dan proposal. Aplikasi dengan fitur lengkap sudah dibuat. Dari simpan-pinjam *online*, voting

musyawarah via gawai, hingga katalog hasil pertanian dalam format *marketplace*.

Tapi aplikasi itu lebih sering jadi penghuni sunyi di *playstore*. Jarang diunduh. Jarang dipakai. Kalaupun sudah terpasang, hanya menumpuk memori ponsel dan akhirnya dilupakan. Seperti buku petunjuk garansi *rice cooker*, dibuka hanya sekali lalu tersimpan di laci, tak pernah disentuh lagi.

Mengapa bisa begitu? Karena sebagian pengurus koperasi masih alergi dengan "*dashboard* digital". Mereka lebih percaya pada buku besar sobek-sobek yang disimpan di lemari besi yang kuncinya entah di mana. Akuntabilitas bagi mereka bukan soal sistem digital, melainkan soal "kepercayaan". Sayangnya, kepercayaan tanpa pencatatan yang rapi sering kali berakhir pada kebocoran, manipulasi, dan perselisihan.

Kenyataannya, digitalisasi koperasi sering berhenti di fase ikut-ikutan (*fasad*). Laptop koperasi memang dibeli, tapi lebih sering dipakai anak pengurus untuk main *Minecraft* atau nonton YouTube. Akun media sosial koperasi memang dibuat, tapi isinya cuma ucapan ulang tahun pengurus dan *repost meme* motivasi, tanpa konten yang berarti. Aplikasi internal memang ada, tapi sering lupa *password*, dan panik luar biasa saat WiFi tiba-tiba tidak aktif.

Digitalisasi koperasi sejatinya bukan sekadar urusan aplikasi canggih atau logo futuristik. Ini soal efisiensi kerja, keterbukaan akses, dan partisipasi nyata. Rumah koperasi digital bukan rumah yang

dipenuhi kabel dan layer LED. Tapi rumah yang setiap penghuninya punya kunci pintu yang sama, bisa keluar masuk dengan hak yang setara.

Kunci yang setara bagi setiap anggota ini bukan mimpi setinggi langit, melainkan solusi nyata yang telah terbukti mampu memangkas birokrasi dan biaya.

Buktinya, studi kasus pada Koperasi Mahasiswa (Kopma) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan partisipasi nyata. Dengan memanfaatkan platform pertemuan virtual seperti *zoom* untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT), jumlah peserta yang hadir meningkat drastis, ratusan peserta aktif dibanding pertemuan fisik (Syaiful et al., 2022).

Penelitian lain menegaskan bahwa akses anggota terhadap data keuangan, aktivitas usaha, dan perkembangan koperasi menjadi lebih mudah dan transparan melalui platform digital (Huda et al., 2023).

Keterbukaan berbasis digital ini secara langsung meningkatkan kepercayaan anggota serta partisipasi mereka, karena mereka dapat memantau dan mengontrol penggunaan dana kapan pun, dan di mana pun.

Kisah ini membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar urusan aplikasi canggih. Melainkan alat untuk menciptakan keterbukaan, efisiensi kerja, dan partisipasi nyata bagi setiap anggota di mana pun mereka berada, sehingga mewujudkan hak yang setara bagi semuanya.

Pertanyaannya, apakah kita sungguh siap menjadikan koperasi beradaptasi digital sebagai budaya? Ataukah kita biarkan saja koperasi terus menjadi rumah tua yang dicat dengan mural futuristik, padahal di dalamnya masih dihuni buku besar sobek dan kas manual yang rawan bocor?

Jika koperasi terus menunda adaptasi digital, jangan heran bila generasi muda memilih membangun rumah baru mereka sendiri dan meninggalkan rumah lama yang meski dicat ulang, tetapi retak di fondasi. Teknologi pada akhirnya harus menjadi alat untuk menciptakan keterbukaan, efisiensi, dan hak yang setara bagi semua anggota, mewujudkan kembali nilai gotong royong yang sesungguhnya.

Demokrasi dan Anggaran yang Terbuang

Di atas kertas, Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah jantung koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutnya sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ruang di mana laporan dibuka, rencana disusun, dan keputusan besar diambil.

Idealnya, RAT adalah ruang demokrasi partisipatif, tempat anggota benar-benar menjadi pemilik, menegakkan prinsip kekeluargaan yang bermartabat.

Namun, idealitas di atas kertas itu jarang tercermin di lapangan. RAT lebih sering menjelma menjadi pentas tahunan. Semacam sinetron dengan alur yang sudah bisa diterka. Sejak pagi kursi plastik ditata rapi, spanduk besar digantung dengan huruf kapital, foto pengurus terselip di sudut. Sambutan camat hampir selalu diwakilkan, mikrofon berderak kresek-kresek saat ketua membuka acara. Semua berjalan seperti dongeng dengan akhir cerita yang sudah bisa ditebak.

Babak yang dianggap paling sakral datang berikutnya. Laporan keuangan. Dibacakan cepat, panjang, dan penuh angka. Fotokopiannya buram, tebal berlembar-lembar, lebih mirip mantra kuno daripada catatan kas. Mungkin hanya bendahara dan Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti isinya.

Bagi sebagian besar anggota, laporan itu tak lebih dari formalitas yang harus dibacakan. Sebuah simbol keterbukaan yang tak berisi. Transparansi memang ada. Tetapi sebatas tumpukan kertas yang kemudian dilipat jadi kipas, atau dibawa pulang untuk menulis prediksi togel di pos kamling.

Setelah laporan keuangan selesai, forum bergeser ke sesi yang lebih hidup. Kopi pahit disajikan, rasanya getir seolah ikut menegaskan demokrasi yang penuh basa-basi.

Ketika mikrofon dibuka, lalu mengalirlah suara-suara. Ada yang menuntut iuran dikembalikan. Ada yang mengusulkan proyek pengadaan sapi, padahal koperasi bergerak di sembako.

Ada pula yang ingin mengganti logo koperasi agar lebih “kekinian,” hasil karya keponakan kepala dusun yang baru kursus desain grafis minggu lalu. RAT pun beralih fungsi menjadi ruang curhat massal. Banyak ekspresi, sedikit solusi.

Setelah berbagai unek-unek ditumpahkan, tibalah babak paling ditunggu. Pemilihan pengurus. Demokrasi kembali dipanggungkan. Tapi kali ini, dengan cara unik. Kandidat dipilih bukan karena visi-misi, melainkan karena kedekatan sosial. “Anak siapa.” “Tetangga siapa.” Atau “siapa yang

dulu traktir nasi padang.” Pemilihan pun lebih mirip ajang pemilihan ketua kelas. Ramai, meriah, tapi hasilnya “bodoh amat.”

Dari sinilah RAT berjam-jam kerap berakhir tanpa tindak lanjut. Ide-ide berhamburan, tapi jarang berubah menjadi program nyata. Bukannya melahirkan keputusan, forum justru tenggelam dalam perdebatan tanpa arah. Musyawarah berlalu tanpa keputusan. Hanya menghasilkan kebisingan.

Padahal, demokrasi sejatinya adalah proses partisipasi yang memperkuat kapasitas warga. Carole Pateman (1970: 42–43) mengingatkan bahwa partisipasi yang bermakna justru melatih warga agar mampu berperan dalam demokrasi lebih luas.

Jika RAT hanya melahirkan kebisingan tanpa keputusan, maka ia kehilangan fungsi pendidikannya bagi anggota. Koperasi yang terlalu lama terjebak dalam kebisingan perlahan kehilangan relevansinya, seperti metromini patah *cardan*, masih saja didorong ramai-ramai tanpa tahu terminal mana yang hendak dituju.

John Keane (2009: 689–690) menyebut demokrasi sehat sebagai *monitory democracy*. Forum publik yang memantau kekuasaan. RAT seharusnya bisa berfungsi demikian, tapi sering gagal karena terjebak dalam ritual.

Sebenarnya RAT bisa dan seharusnya menjadi ruang strategis. Ia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk mengukur kesehatan koperasi.

Paul Hirst (1994: 23–25) sudah lama menekankan bahwa asosiasi warga, termasuk koperasi, adalah fondasi demokrasi ketika dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, realitas berbicara lain. Ketiadaan RAT dan buruknya tata kelola menciptakan fenomena "koperasi papan nama" atau koperasi yang telah lama vakum.

Pemerintah pun tampak bosan dengan drama RAT yang mandek. Ketidakaktifan ini direspons tegas melalui Permenkop No. 9 Tahun 2018, yang secara eksplisit menyatakan bahwa, koperasi yang tak pernah menggelar RAT lebih baik dibubarkan daripada dibiarkan hidup tanpa aktivitas.

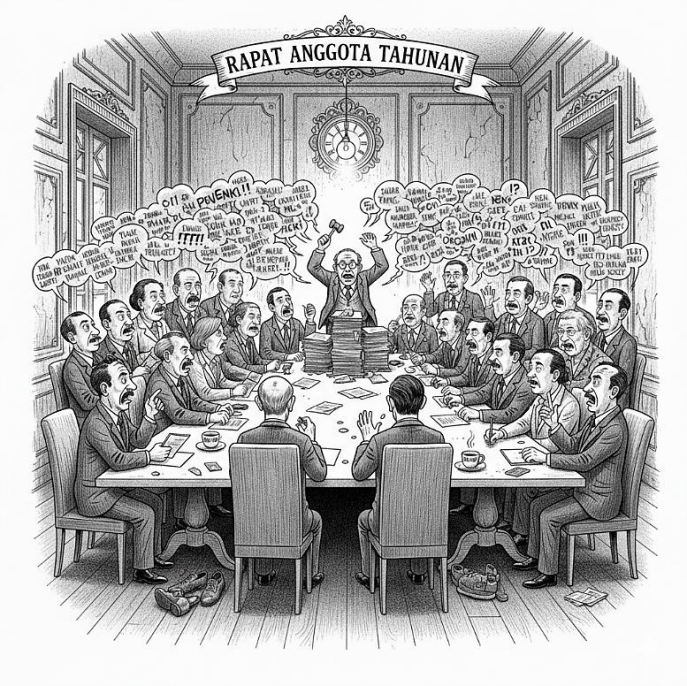

Dan pembubaran itu bukan sekadar gertakan. Sebagai langkah pembersihan, dalam periode 2014 hingga 2019, lebih dari 82.000 koperasi ditutup, laksana pohon-pohon kering yang ditebang dari hutan administrasi. Efeknya, jumlah koperasi menyusut tajam. Dari lebih 200 ribu tinggal sekitar 127 ribu saja (*Kompas*, 12 Juli 2019).

Dari sisi angka, jumlah koperasi memang tampak menurun akibat penutupan beberapa koperasi itu. Namun, yang dibutuhkan bukan kuantitas yang gemuk di statistik, melainkan kualitas yang hidup di lapangan, dan koperasi yang hanya hidup di papan nama sebetulnya bukanlah aset, melainkan beban.

Sri-Edi Swasono (2010: 57–59), seorang ekonom yang sejak lama membela koperasi, pernah mengingatkan, koperasi hanya akan hidup jika anggota benar-benar terlibat, bukan sekadar hadir untuk menandai absen di RAT. Sebab tanpa partisipasi nyata, koperasi hanyalah papan nama yang menggantung di tembok balai desa.

Selama RAT masih diperlakukan seperti pesta adat dengan ritual wajib, fotokopi buram, kopi pahit, dan sambutan formalitas, ia akan tetap menjadi agenda rutin yang tak punya isi. Yang tumbuh bukan kesadaran kolektif, melainkan rasa bosan berjamaah. RAT pun menjelma menjadi Rapat Anggaran Terbuang. Di mana biaya rapat menguap lebih cepat daripada semangat gotong royong.

Padahal, RAT sebenarnya adalah ruang kejujuran. Tempat angka-angka dibaca dengan kepala dingin, keputusan diambil dengan hati yang sejuk, dan kalau boleh sedikit tambahan..., mungkin sudah waktunya kopi RAT diseduh lebih layak. Agar setidaknya yang pahit hanya perdebatan, bukan minumannya yang mengundang trauma lidah.

Koperasi dan Politik Lokal

Kalau bicara koperasi dan politik lokal, jangan kaget bila kita menemukan kisah yang rasanya lebih mirip sinetron tengah malam. Ada drama. Ada intrik. Ada tokoh yang muncul tiba-tiba hanya untuk menutup satu adegan. Bedanya, ini bukan hiburan. Ini kenyataan.

Koperasi, yang mestinya jadi rumah ekonomi rakyat, sering berubah jadi panggung politik. Kepala desa, anggota DPRD, bahkan politisi kawakan bisa mendadak tampil sebagai “pembina koperasi.” Alasannya bukan karena cinta mati pada semangat gotong royong, melainkan karena koperasi dianggap lahan suara, jaringan, dan modal politik.

Modus operandi politik ini terkesan sederhana, namun merusak fundamental. Menjelang pemilu, tiba-tiba koperasi bermunculan seperti jamur di musim hujan. Surat keputusan dibuat terburu-buru. Anggota direkrut dadakan, dan simpanan pokok dibayar dari amplop aspirasi. Pengurus diangkat bukan karena kemampuan, melainkan kedekatan. RAT dijalankan hanya sebagai formalitas.

Di sinilah politik lokal menemukan pintu masuknya melalui janji, kedekatan, dan rasa sungkan yang diwariskan dalam budaya patronase. James C. Scott (1972, 92–93) menyebut fenomena ini sebagai *patron-client politics*, di mana hubungan personal lebih dominan daripada rasionalitas organisasi.

Koperasi pun jadi proyek politik musiman. Didorong ketika ada kepentingan, ditinggalkan ketika tak lagi berguna. Setelah suara terkumpul, koperasi itu perlahan hilang, menyisakan spanduk dan laporan keuangan yang tak pernah disahkan. Saat koperasi gagal, yang disalahkan pengurus, padahal mereka hanyalah boneka yang dimainkan oleh kepentingan.

Di banyak daerah, koperasi tak ubahnya miniatur politik nasional. Ada elite kecil yang menguasai keputusan. Ada massa anggota yang hanya menjadi pendengar. Demokrasi di atas kertas. Oligarki di lapangan.

Alexis de Tocqueville (1835/2006, 489–492) sudah lama mengingatkan bahwa demokrasi bisa kehilangan rohnya bila warga tak sungguh-sungguh terlibat dalam asosiasi yang seharusnya menjadi sekolah partisipasi.

Dalam konteks koperasi, efeknya jelas. Anggota kehilangan kepercayaan, koperasi kehilangan marwah. Bukan lagi kendaraan pemberdayaan ekonomi, ia justru terjebak dalam pusaran pencitraan. Koperasi menjadi etalase politik. Papan namanya tegak, tapi jiwanya melayang.

Namun, tidak berarti politik harus dijauhi. Politik tidak bisa dihapus dari koperasi. Sebab ia adalah bagian intrinsik dari kehidupan sosial. Yang penting adalah jarak dan posisi.

Seperti ditegaskan Harold Lasswell (1936, 3–5), politik adalah soal "*who gets what, when, how*." Maka koperasi yang pandai mengartikulasikan kepentingan ekonomi anggotanya justru sedang memainkan peran politik yang sehat dan memberdayakan.

Seperti kapal yang berlayar, koperasi harus tahu siapa penumpang dan siapa awak tetap. Penumpang boleh ikut mengarungi badai. Tapi kalau penumpang ingin menguasai anjungan hingga ruang mesin, maka kapal itu kehilangan kontrol.

Dalam arti sejatinya, politik adalah upaya mengatur kepentingan bersama. Ketika koperasi mampu mengartikulasikan kepentingan ekonomi rakyat di ruang politik, ia justru sedang menjalankan mandat sejarahnya. Menyeimbangkan kuasa modal dan suara rakyat. Jadi politik bukan najis. Ia tak selalu jorok. Keduanya bisa saling menopang dalam memperkuat organisasi koperasi.

Di sinilah tantangan bagi koperasi. Apakah ia tetap teguh sebagai gerakan rakyat, atau sekadar menjadi alat politik yang berganti warna setiap lima tahun.

Antonio Gramsci (1971, 204–210) menulis bahwa hegemoni bekerja bukan hanya lewat negara, tetapi juga melalui organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, koperasi bisa menjadi benteng rakyat atau justru saluran kekuasaan elite, tergantung bagaimana ia dijalankan.

Bila koperasi terus membiarkan politik menjadi sopirnya, ia hanya akan jadi penumpang dalam kendaraan kekuasaan. Namun bila ia belajar mengemudi sendiri, dengan peta transparansi dan bahan bakar partisipasi, maka ia akan mampu mengantar rakyat menuju kemandirian sejati.

Modal Sosial vs Modal Riil

Koperasi sering dielu-elukan seperti monumen moral ekonomi rakyat. Disebut-sebut dalam pidato pejabat. Disanjung dalam seminar, dan dijadikan bukti bahwa gotong royong masih berdenyut di nadi bangsa.

Tapi di balik itu, apakah koperasi hari ini benar-benar hidup karena kekuatan anggotanya, atau hanya bertahan karena masih diberi nafas lewat pinjaman dan bantuan pemerintah?

Koperasi kerap dipuja karena memiliki modal sosial. Sebuah konsep yang konon tak ternilai harganya. Di dalamnya hidup semangat gotong royong, saling percaya, solidaritas, dan kekeluargaan.

Semua itu disebut sebagai roh pembeda yang menjadikan koperasi lebih manusiawi dibanding perusahaan kapitalis. Sebuah narasi yang terdengar indah, bahkan menyejukkan, di tengah dunia ekonomi yang kian rakus dan individualistik.

Namun, jika modal sosial memang sedemikian sakral, seberapa sering ia benar-benar bekerja dalam keseharian koperasi? Seberapa kokoh ia menopang buku kas dan neraca keuangan?

Modal sosial memang penting, tetapi terlalu sering ia berubah menjadi retorika kosong. Semacam tabir halus yang menutupi kenyataan pahit, yakni ketiadaan modal riil.

Karena itu, keberlangsungan koperasi tidak bisa hanya ditopang oleh khotbah persaudaraan yang diulang dalam setiap Rapat Anggota Tahunan. Ia menuntut angka-angka konkret. Saldo kas yang sehat, arus dana yang jelas, dan manajemen yang disiplin.

Idealnya, modal sosial bukanlah sekadar wacana sentimental. Ia adalah energi kolektif yang harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tindakan ini berupa kedisiplinan anggota dalam membayar simpanan, transparansi dalam pengelolaan dana, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan. Tanpa manifestasi riil tersebut, modal sosial hanyalah mitos. Indah dalam pidato, tetapi kosong dalam praktik.

Buktinya, kita sering menemui anggota koperasi yang ramai bicara kebersamaan di Rapat Anggota, namun mati kutu ketika diminta menyetor simpanan wajib. Begitu pembicaraan menyentuh soal iuran, semangat gotong royong seringkali mencair seketika, seperti es batu yang direndam dalam air panas.

Orang boleh datang ke rapat dengan pakaian terbaik dan bersuara paling lantang dalam rapat anggota, namun jangan lupa bahwa koperasi tidak berdiri di atas penampilan, melainkan di atas setoran nyata dan perputaran uang yang lancar.

Solidaritas boleh saja bergema sekeras deru pesawat tempur. Namun, jika semangat itu hanya berhenti di ruang rapat, kas koperasi akan tetap kosong. Akibatnya, koperasi hanya hidup di tumpukan notulen, bukan di lembar neraca keuangan.

Di tengah kas yang kosong itulah modal sosial menjelma alat pembungkam. Anggota segan mengkritik pengurus yang menyimpang karena takut merusak harmoni. Muncul pemikiran, “Ah, masa kita curiga sama Pak Ketua? Beliau, kan, orang lama.” Maka, ketika motor baru pengurus parkir di halaman kantor koperasi, semua diam. Bukan karena tak tahu, tetapi karena takut dikira tak setia.

Begitulah ketika modal sosial kehilangan keseimbangannya. Ia berubah menjadi selimut yang menutupi pembusukan internal. Koperasi pun menjadi rumah sosial yang terlalu ramah. Banyak senyum, tapi lantainya lapuk. Kita berpelukan di ruang tamu, sementara di belakang, tikus-tikus kenyang menggerogoti karung beras terakhir. Tak ada yang mau membongkar gudang, karena semua merasa lebih aman berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Demi kebersamaan?

Padahal, ekonomi tak bisa dihidupi oleh ilusi kebersamaan. Dunia kini bergerak dengan data, bukan sekadar niat baik. Modal sosial tetap penting, tetapi ia hanyalah penopang. Pondasi sesungguhnya adalah kas yang sehat, laporan yang transparan, dan audit yang berani membuka borok. Kepercayaan tanpa sistem hanyalah kesia-

siaan. Solidaritas tanpa disiplin finansial hanyalah drama moral.

Karena itu, operasi harus berani berdiri di atas dua kaki. Roh sosial dan logika bisnis. Yang satu berfungsi menjaga kemanusiaan anggotanya, sementara yang lain menjamin keberlanjutan ekonomi lembaga.

Koperasi tidak akan kehilangan jiwanya hanya karena bersikap profesional. Justru di sinilah koperasi diuji, apakah ia mampu membuktikan bahwa idealisme dan efisiensi dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Ibarat sebuah perahu, modal sosial adalah layar yang membuat kita merasa aman berlayar bersama menuju tujuan yang sama. Tapi modal riil adalah lambung kayu yang kokoh, yang memastikan perahu tidak karam ketika ombak besar menghadang.

Dari Gudang Beras ke Dashboard Digital

Bayangkan koperasi di masa lalu yang sering hadir seperti gudang kecil di pojok balai desa. Karung-karung beras ditumpuk seadanya di samping papan tulis kapur penuh coretan angka dan debu menempel. Di sana, catatan transaksi dibuat dengan pensil tumpul dan buku besar yang warnanya sudah buram dimakan waktu. Itulah wajah koperasi lama. Sederhana, tradisional, penuh aroma keringat gotong royong.

Tapi dunia tak lagi berjalan pelan. Dunia kini berlari dengan sepatu digital. Sementara koperasi masih bertahan dengan sandal jepit. Bila terus begini, ia bukan sedang menjaga tradisi, melainkan sedang antre untuk dilindas zaman.

Digitalisasi kini bukan lagi urusan kota atau gaya hidup. Melainkan garis hidup bagi keberlangsungan koperasi. Ia bukan tren, melainkan kebutuhan mendasar. Koperasi tidak bisa terus-menerus menjual sabun cuci dan minyak kayu putih sambil mencatat transaksi di buku kertas bergaris. Ia harus naik kelas. Dari pengelola barang menjadi pengelola data.

Di era ini, karung beras berganti dengan *dashboard*, dan kalkulator tua digantikan oleh *software* akuntansi *real-time*.

Tantangan koperasi hari ini bukan lagi toko sebelah, melainkan raksasa digital seperti *e-commerce* dan *fintech* yang sudah menembus pelosok, menawarkan pinjaman cepat dan layanan efisien.

Hal ini menegaskan bahwa kelemahan struktural dan administratif di tubuh koperasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan faktor penentu daya saing. Dan di tengah derasnya arus perubahan itu, kelemahan itu tampak bagai kapal tua yang sibuk menambal bocor, padahal ombak sudah semakin tinggi.

Mustahil koperasi bisa bersaing jika masih sibuk mencari nota yang hilang atau menyalin laporan keuangan dengan tulisan tangan. Dunia telah berubah, dan yang tidak beradaptasi akan tertinggal bukan karena kalah, melainkan karena enggan berubah.

Ironisnya, kata “digital” di banyak tempat masih dianggap asing, bahkan menakutkan. Sebagian pengurus menolaknya dengan dalih yang terdengar bijak. “Koperasi itu lembaga rakyat, jangan dibuat rumit.” Padahal kalimat itu lebih sering menjadi tameng untuk menutupi rasa takut kehilangan kendali. Sebab sistem digital menuntut keterbukaan, dan keterbukaan meniadakan ruang bagi manipulasi.

Masalah koperasi kita bukan gagap teknologi, melainkan gagap kejujuran. Digitalisasi menuntut

akuntabilitas, dan akuntabilitas menuntut tanggung jawab, dua hal yang kerap dihindari oleh mereka yang nyaman hidup dalam kabut administrasi manual. Ketakutan terhadap transparansi itulah yang perlahan membunuh semangat gotong royong.

Ketakutan itu tampak nyata dalam praktik sehari-hari. Selama buku kas bisa disembunyikan di lemari besi tua, selama Rapat Anggota Tahunan bisa dimanipulasi dengan fotokopi buram, selama transparansi dianggap ancaman bagi "ketenangan", maka modernisasi koperasi hanya akan menjadi utopia tanpa wajah.

Padahal praktik seperti itu justru merampas hak paling dasar para anggota. Mereka adalah pemilik sah koperasi, dan karena itu, mereka pulalah yang paling berhak atas keterbukaan laporan dan keputusan.

Di sinilah digitalisasi menemukan relevansinya. Data adalah bentuk baru dari gotong royong. Dengan sistem digital, setiap anggota bisa melihat laporan yang sama, di waktu yang sama, tanpa menunggu tafsir sepihak dari pengurus. Inilah wajah koperasi modern, kolaborasi berbasis data, bukan sekadar kepercayaan buta.

Bukti keberhasilan itu sudah nyata di berbagai daerah, menepis keraguan atas kesulitan implementasi. Koperasi Agro Niaga Jabung di Malang, misalnya, berhasil meningkatkan omzet secara signifikan setelah masuk ke pasar digital melalui *e-commerce*. Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat yang menerapkan sistem digital

Alokop berhasil memperkuat akuntabilitas keuangannya.

Bahkan, Koperasi Bintang Muda 88 menunjukkan bagaimana digitalisasi mampu memperbaiki pelayanan, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan anggota. Omzet UMKM binaan mereka meningkat 3–5 kali lipat, sementara akses pembiayaan makin terbuka. Ini bukan cerita kosong. Namun di sisi lain, banyak koperasi hari ini masih hidup hanya di papan nama. Kantornya berdiri, tapi fungsinya beku. RAT tetap digelar, tetapi sekadar memenuhi standar formal.

Padahal, digitalisasi seharusnya menjadi terapi, bukan ancaman. Ia adalah cara memulihkan kepercayaan publik yang sekian lama terkikis oleh kecurigaan dan ketertutupan. Karena itu, transformasi digital bukan sekadar *upgrade* sistem. Ia adalah revolusi moral dan struktural. Ia menuntut disiplin, integritas, dan keberanian meninggalkan romantika lama.

Koperasi yang berani berubah sedang menyiapkan masa depan. Yang menolak, siap-siap pensiun dini. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah koperasi perlu digitalisasi, tetapi kapan ia akan melakukannya sebelum terlambat.

Jika koperasi masih ingin relevan, ia harus berani melompat dari gudang beras yang pengap menuju *dashboard* digital yang terang benderang. Dan dari romantika masa lalu, menuju era keterbukaan yang jujur dan tangguh. Karena di zaman ini, bukan yang besar yang bertahan, melainkan yang mau berubah.

Bagian III
Dilema Modernisasi

Menyulam Jala di Tengah Ombak

Globalisasi datang bukan seperti tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Melainkan seperti angin laut yang tiba-tiba menerjang jendela rumah. Ia membawa kabar baru tentang efisiensi, percepatan, dan skala ekonomi yang katanya tak terelakkan.

Tapi bagi koperasi, kabar itu terdengar seperti ujian yang dibungkus janji manis. Di balik istilah “pasar bebas” dan “kompetisi sehat,” tersimpan kekhawatiran tentang harga dunia yang bergerak seperti ombak besar yang menelan perahu kecil.

Modal asing datang deras seperti arus bawah laut, menghantam siapa pun yang tak sempat menambatkan jangkar. Di tengah pusaran itu, koperasi seperti nelayan yang berusaha menyulam jala di tengah ombak (tangan tetap bekerja), meski setiap simpul bisa terurai bila kehilangan keseimbangan.

Koperasi yang lahir dari semangat lumbung desa dan gotong royong kini harus berhadapan dengan algoritma pasar global, tempat harga dan selera

ditentukan oleh mesin, bukan musyawarah. Pasar seperti ini tidak mengenal gotong royong. Ia hanya mengenal laba.

Benar, globalisasi membuka jendela baru. Kopi Manggarai bisa diseduh di kafe Berlin. Minyak kemiri Alor bisa dijual di *platform* Tokyo. Dunia terbuka, tapi anginnya kencang. Mereka yang pandai membaca arah angin bisa berlayar tanpa takut nyasar. Mereka yang ceroboh akan karam di tengah lautan gelombang data dan modal.

Globalisasi juga seperti samudra tanpa belas kasih, yang lemah terseret arus, yang kuat akan menguasai gelombang. Ritel internasional menjual lebih cepat dan lebih murah, koperasi di desa masih menghitung stok dengan pulpen. Solidaritas yang dulu jadi ruh, kini tampak seperti nostalgia yang tak tercatat di neraca.

Lebih ironis lagi, sebagian koperasi justru menanggalkan jiwanya demi tampil modern. Mereka berganti logo futuristik, mengadopsi tagline berbahasa Inggris, dan menggelar "*strategic meeting*" dengan slide penuh istilah-istilah menyemangat, seolah bahasa mampu menggantikan nurani. Padahal, di balik kemasan itu, pola pikir masih feodal, pengurus bagaikan tuan tanah kecil, alergi terhadap transparansi. Akibatnya, koperasi kehilangan dua hal sekaligus. Yaitu akar komunitas dan daya saing. Terlalu "modern" untuk konteks desa, tapi terlalu "kolot" untuk pasar global.

Ironi seperti itu bisa ditemukan di panggung *agri-tech* tentang startup yang berteriak soal revolusi

pertanian, tapi tumbang karena lupa cara menanam kepercayaan. Tumbasin ambruk Mei 2023, Stoqo runtuh pada 2020, TaniHub dan TaniFund menyusut hingga kehilangan izin (*CNBC Indonesia*, 5 Mei 2023; *Katadata*, 8 Mei 2023; OJK, Mei 2024). Semua mengajarkan kisah pahit, *algoritma* tak bisa menanam padi, dan gawai tak mampu menggantikan gotong royong.

Namun tak semua kisah berakhir karam. Di banyak tempat, muncul koperasi-koperasi baru yang cerdas membaca arah ombak. Mereka tak menolak globalisasi, tapi juga tak menelan garamnya mentah-mentah. Mereka menggunakan teknologi bukan untuk ikut tren, melainkan untuk memperkuat partisipasi anggota. Mereka mengekspor bukan hanya produk, tapi juga nilai cerita, budaya, dan identitas lokal yang membuat dunia berhenti sejenak untuk mendengar.

Koperasi semacam ini mengubah digitalisasi menjadi alat demokratisasi. Rapat anggota digelar secara daring, laporan keuangan dapat diakses *real-time*, dan setiap keputusan diambil dalam transparansi. Di tangan mereka, globalisasi bukan lagi ombak yang menenggelamkan, melainkan laut yang bisa diarungi bersama. Sebab bagi mereka yang paham, menyulam jala di tengah ombak bukan sekadar bertahan hidup. Itu seni menemukan keseimbangan baru antara modernisasi dan akar budaya, antara efisiensi dan empati, antara keuntungan dan keadilan.

Koperasi yang bijak tahu, ombak globalisasi tak perlu dilawan dengan marah, cukup dipahami dengan sadar. Sebab laut selalu memberi ruang

bagi mereka yang sabar menyulam simpul demi simpul, hingga jala itu bukan hanya menangkap ikan, tapi juga menjaring harapan.

Antara Tradisi dan Teknologi

Di banyak desa di Indonesia, koperasi ibarat rumah tua di tengah kampung. Catnya mengelupas, atapnya bocor, namun fondasinya masih kokoh. Sehingga butuh renovasi. Rumah tua ini membutuhkan arsitek yang peka rasa, bukan sekadar jago desain. Arsitek yang mampu menghargai ukiran lama sambil menggambar rancangan masa depan.

Dalam konteks koperasi, arsitek itu adalah kepemimpinan yang bijak, serta budaya organisasi yang mampu menyelaraskan tradisi dengan tuntutan zaman.

Namun, proses penyelarasan itu bukanlah revolusi instan yang menuntut pemusnahan total masa lalu. Kita tak ingin menyaksikan robot AI tiba-tiba menggantikan nenek-nenek pengurus koperasi yang masih menulis laporan keuangan di buku kuitansi.

Sebaliknya, yang kita perlukan adalah simfoni yang harmonis antara dunia canggih dan pola pikir tradisional. Upaya untuk menyalakan senter di ruang arsip tua, bukan menjadikannya tempat pembakaran.

Kita hanya perlu pemimpin yang peka, yang mampu menahan godaan untuk menciptakan solusi sebelum fondasi kesiapan para anggotanya benar-benar siap. Karena itulah, inovasi harus didefinisikan ulang dalam konteks gotong royong.

Maka dari itu, inovasi, dalam koperasi, bukan soal gegap gempita teknologi. Melainkan bagaimana teknologi dapat mempermudah kehidupan sehari-hari anggota. Sebab hal-hal sederhana sering kali lebih bermanfaat daripada fitur canggih yang rumit. Transparansi kas, rapat yang efisien, dan kemudahan mengakses laporan keuangan merupakan inovasi nyata yang langsung dirasakan anggota.

Bentuk inovasi seperti ini menegaskan kembali esensi koperasi, yaitu menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif. Anggota pun tak lagi harus menunggu berlembar-lembar dokumen yang kemudian hanya dijadikan bungkus gorengan di warung belakang kantor desa.

Bayangkan kasir koperasi yang dulu menghitung uang dengan pensil tumpul dan jari berlumur tinta. Kini, dengan aplikasi sederhana di ponsel, ia bisa mencatat transaksi dan stok barang dalam sekejap. Anggota dari desa terpencil dapat mengikuti rapat daring tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam ke balai desa untuk mendengar laporan kas yang sama setiap tahun.

Teknologi sederhana ini mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses, dan memperluas partisipasi, tanpa menghilangkan sentuhan

manusia dalam pengelolaan koperasi. Inilah wujud ideal dari digitalisasi, modernisasi yang melayani tradisi.

Meski demikian, jalan menuju idealisme ini penuh ranjau. Perlu dipahami juga bahwa teknologi bukan tongkat sihir. Literasi digital yang timpang, jaringan internet yang naik turun, dan risiko kebocoran data tetap mengintai. Tanpa budaya digital yang matang, aplikasi canggih sekalipun tidak akan memberi apa-apa.

Oleh karena itu, koperasi harus bijak. Bukan sekadar menginstal aplikasi, tapi menanamkan pemahaman. Bukan hanya membeli alat, tapi membangun budaya digital yang adil, mudah

diakses, dan tidak membuat anggota merasa seperti tersesat di dunia lain.

Inovasi idealnya menjadi jembatan, bukan tembok penghalang. Jembatan yang menghubungkan kearifan lokal dengan tuntutan zaman. Jembatan yang kokoh dibangun di atas fondasi kepercayaan dan solidaritas anggota.

Koperasi harus tetap menjadi ruang hidup, bukan museum dengan rak arsip berdebu. Gotong royong dan kebersamaan bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan nadi yang menghidupkan organisasi.

Penelitian mendukung hal ini. Digitalisasi memperluas akses hingga ke wilayah terpencil. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) *Credit Union* (CU) Kasih Sejahtera di Atambua, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan keberhasilan digitalisasi dalam menjangkau anggota jauh melebihi layanan perbankan formal. Akses simpan pinjam dan kredit menjadi lebih cepat, transparan, dan merata. Teknologi di sini bukan sekadar aplikasi canggih, melainkan alat untuk menciptakan keterbukaan, efisiensi kerja, dan partisipasi nyata bagi semua anggota (Deo, 2024, hlm 112).

Studi kasus tersebut menegaskan kembali satu hal: Pada akhirnya, inovasi bukan diukur dari seberapa canggih teknologi yang dipakai. Tapi seberapa besar ia mampu memperkuat solidaritas. Sebab koperasi bukan pameran startup, melainkan laboratorium kemanusiaan yang sedang belajar berdamai dengan zaman.

Ibarat rumah reyot yang mau diperbaiki. Bila rumah tua itu direnovasi dengan kebijaksanaan, maka di sanalah gotong royong dan digitalisasi bisa menari bersama. Bukan untuk saling menyingkirkan, melainkan untuk memastikan rumah ini tetap kokoh dan relevan di tengah arus modernisasi.

Saat Anggota Menjadi Username

Koperasi sedang berada di persimpangan zaman. Dulu, rapat anggota berarti berkumpul di balai desa, menyeduh kopi panas, dan membuka buku kas yang warnanya sudah sama dengan tanah di lantai.

Kini, koperasi dituntut punya *dashboard* digital, aplikasi mobile, bahkan *blockchain* demi transparansi yang “tak bisa dibohongi.” Semua terdengar gagah, seperti rumah tua yang tiba-tiba ingin dipasangi *smart door lock* dan sensor cahaya.

Namun jangan bayangkan semua anggota koperasi langsung siap bertransformasi menjadi *user*. Di banyak tempat, masih ada yang berjuang memahami perbedaan antara “*scroll*” dan “*swipe*.”

Ada juga yang perlu bantuan cucunya untuk mengisi *username* karena huruf kecil dan besar dianggap dua makhluk berbeda. Bahkan ada yang tetap membawa buku catatan, “jaga-jaga kalau aplikasinya macet.”

Maka lahirlah koperasi digital. Bukan sekadar lembaga ekonomi. Tapi juga lembaga pendidikan teknologi rakyat. Pengurus bukan hanya pengelola, melainkan juga guru, mentor, dan kadang terapis, yang harus menenangkan anggota yang panik karena saldo di aplikasi terlambat ter-*update*. Di sinilah letak ironi sekaligus keindahannya. Digitalisasi membuat koperasi harus lebih manusiawi dari sebelumnya.

Namun perlu diingat. Teknologi tak otomatis membawa pembebasan. Di banyak koperasi digital, anggota mengkin saja menjelma menjadi sekadar *username*. *Login* tanpa jiwa, klik tanpa diskusi. Voting tanpa musyawarah. Gotong royong bertransformasi menjadi *group chat* yang sunyi, di mana hanya pengurus yang bicara.

Sistem digital memang rapi, tapi sering kehilangan kehangatan. Akibatnya, demokrasi ekonomi bisa berubah menjadi algoritma yang beku. Padahal koperasi bukan sekadar wadah transaksi. Ia seharusnya ruang interaksi.

Ketika semua diserahkan pada sistem dan *dashboard*, siapa yang memastikan rasa percaya tetap hidup? Apakah gotong royong masih ada di balik tombol "*agree*"? Ataukah semuanya sudah diambil alih oleh *terms and conditions* yang jarang dibaca tapi selalu diklik "setuju"?

Digitalisasi seharusnya memperluas partisipasi. Bukan menggantinya dengan simulasi. Teknologi yang ideal bukan yang paling canggih, tapi yang paling bermanfaat.

Koperasi yang baik bukan yang punya aplikasi paling cepat, tapi yang paling sabar dalam mendampingi anggotanya belajar bersama. Pelatihan literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan koperasi, bukan formalitas, tapi kebiasaan baru yang menghidupkan rasa percaya dan keterlibatan.

Transparansi juga harus tumbuh lebih dari sekadar fitur *login*. Data transaksi, keputusan rapat, hingga rencana investasi harus terbuka bagi seluruh anggota, tanpa perlu “izin admin.”

Keterbukaan bukan untuk menciptakan ketakutan, tapi menumbuhkan kepercayaan. Koperasi digital harus menjadi rumah kaca yang terang dari segala sisi. Bukan sistem tertutup di balik *algoritma* yang hanya dipahami segelintir orang.

Di tengah derasnya arus modernisasi, tantangan terbesar koperasi justru menjaga roh kebersamaan. Teknologi boleh mengatur, tapi hati manusia tetap yang menggerakkan.

Sebab koperasi yang kehilangan rasa kekeluargaan, hanya akan menjadi sistem data yang efisien namun hampa makna. Seperti robot yang pandai berhitung tapi tak tahu makna solidaritas.

Koperasi digital yang sejati bukanlah yang meniru *startup*. Melainkan yang menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap *klik*.

Ia merangkul semua. Dari yang masih menulis di buku kas hingga yang sudah fasih dengan *blockchain*. Ia mentautkan masa lalu yang penuh

gotong royong dengan masa depan yang penuh inovasi.

Pada akhirnya, koperasi bukan tentang *algoritma*, melainkan tentang manusia. Tentang keyakinan bahwa keadilan ekonomi tidak lahir dari kecepatan akses, tapi dari kebersamaan yang terus diperbarui, baik di balai desa maupun di layar gawai.

Koperasi yang membebaskan bukan yang paling canggih, tapi yang paling peduli. Ia tahu, di balik setiap *username*, masih ada wajah, cerita, dan harapan yang menatap layer, menunggu agar gotong royong bukan sekadar *online*, tapi menemukan jalannya untuk kembali menghangatkan interaksi sesama.

Apakah Koperasi Membebaskan?

Koperasi sering dielu-elukan sebagai penolong ekonomi rakyat. Simbol kedaulatan yang berakar di tanah sendiri, dan jawaban lokal atas ketimpangan global. Ia dipuji sebagai pengejawantahan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi apakah koperasi benar-benar membebaskan? Atau ia kini menjelma menjadi jebakan baru, dibungkus jargon gotong royong dan rapat penuh formalitas?

Di banyak tempat, koperasi tak ubahnya panggung kecil dengan naskah yang diulang-ulang. Demokrasi ekonomi yang dijanjikan berubah menjadi drama kekuasaan yang membosankan. Pengurus tampil bak raja lokal, kebal kritik, gemar rapat, tapi malas berubah. Prinsip “satu anggota, satu suara” akhirnya bergeser menjadi “satu suara pengurus, seribu anggota bungkam.”

Dalam situasi seperti ini, rapat anggota menjelma menjadi ritual tahunan tanpa makna. Anggota datang sekadar menandatangani daftar hadir, lalu

pulang membawa sekotak kue dan selembar harapan yang entah kapan menjadi nyata. Di ruang rapat yang pengap, semangat gotong royong tinggal mimpi. Partisipasi berubah menjadi formalitas.

Koperasi semacam ini tak lagi menjadi alat pemberdayaan, melainkan cermin kecil dari ketimpangan yang lebih besar. Yang kuat semakin berkuasa, yang kecil semakin terpinggirkan. Ironis, karena koperasi justru dilahirkan untuk melawan hal itu.

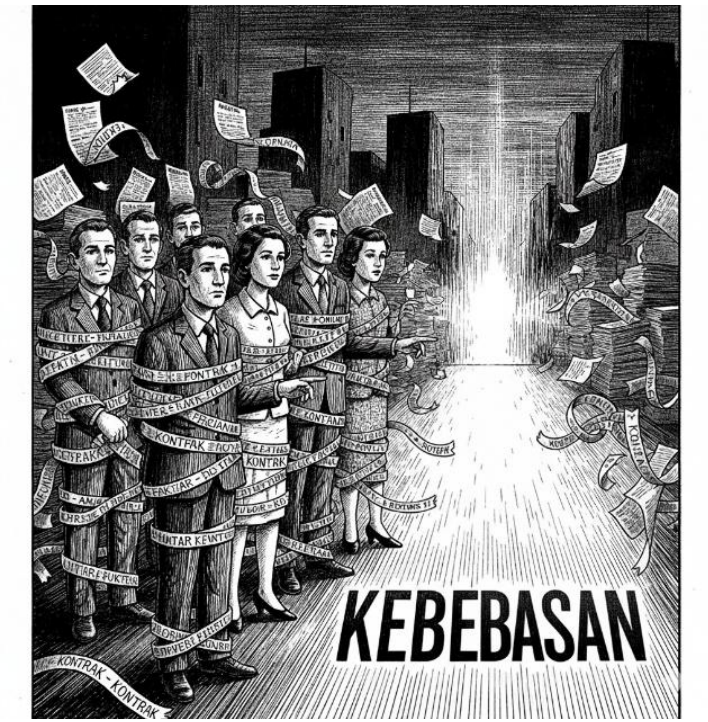

Sebagian koperasi bahkan tumbuh bukan dari kebutuhan anggota, melainkan dari proyek dan proposal. Ia menjelma menjadi lembaga yang lebih sibuk melayani dinas ketimbang memperhatikan anggotanya sendiri. Di meja pengurus, laporan disusun rapi untuk disetor ke pemerintah. Sementara kebutuhan riil anggota dibiarkan digigit kecoa di rak belakang.

Kita berharap koperasi mampu bersaing di era digital. Namun di sisi lain, laporan keuangannya masih disembunyikan di laci meja pengurus. Kita berbicara lantang tentang aplikasi daring dan inovasi bisnis, padahal dasar kepercayaannya saja masih rapuh. Kita lupa, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga pendidikan sosial. Tempat orang belajar tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan kolektif.

Di sinilah koperasi harus kembali menemukan maknanya. Koperasi sejati tidak lahir dari surat keputusan, tetapi dari kesadaran kolektif. Ia dibangun oleh anggota, bukan oleh proyek. Ia menumbuhkan kepercayaan, memperluas partisipasi, dan menjadikan keadilan bukan sekadar slogan, melainkan kebiasaan yang hidup dalam setiap kebijakan ekonomi.

Tentu jalan ini tidak mudah. Koperasi hari ini menghadapi tantangan berat. Pasar bebas yang kejam, birokrasi yang lamban, dan mentalitas pragmatis yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Namun justru di tengah situasi itulah relevansi koperasi diuji. Apakah ia masih mampu menjadi pelindung bagi yang lemah, ruang belajar

bagi yang tertinggal, dan wadah tumbuh bagi mereka yang mencari keadilan ekonomi.

Pertanyaannya kini bukan lagi “apakah koperasi membebaskan,” melainkan “koperasi seperti apa yang benar-benar berpihak?” Sebab koperasi bukan jaminan keadilan, ia hanyalah alat. Semuanya bergantung pada siapa yang menggenggamnya, dan untuk tujuan apa ia digunakan.

Jika koperasi dikelola dengan visi yang jernih, integritas yang teguh, dan keberanian untuk berinovasi, ia bisa menjadi rumah rakyat yang sesungguhnya. Nyaman, terbuka, dan menumbuhkan harapan.

Tetapi jika ia terus dipelihara hanya sebagai formalitas administratif, koperasi tak ubahnya cermin retak. Dari jauh tampak berkilau, namun tak mampu memantulkan wajah yang sebenarnya.

Bagian IV
Jalan Pulang ke Akar Rakyat

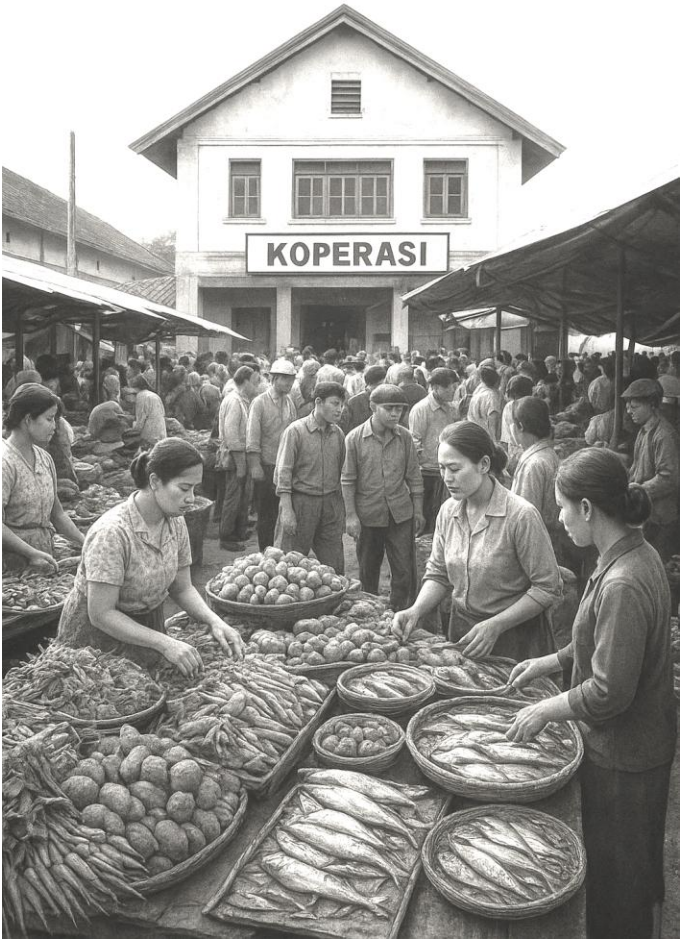
KOPERASI

Koperasi dan Keadilan Sosial

Koperasi tidak lahir sekadar sebagai mesin ekonomi. Ia lahir sebagai alat perjuangan sosial. Wdah untuk menegakkan keadilan di tengah ketimpangan pasar dan dominasi modal besar.

Dalam pandangan Bung Hatta, koperasi adalah bentuk konkret demokrasi ekonomi. Tempat rakyat kecil berdiri tegak tanpa harus menunduk pada kapitalisme dan birokrasi.

Namun, seperti banyak cita-cita besar di negeri ini, idealisme itu kerap tersesat di jalan. Banyak koperasi justru menjelma menjadi panggung ketimpangan baru, bukan menjadi ruang berbagi manfaat. Pengurus sibuk mengatur rapat dan menyusun laporan, sementara anggota datang hanya untuk menunggu hasil yang tak kunjung jelas.

Akibatnya, demokrasi ekonomi yang seharusnya hidup dalam musyawarah, kadang hanya jadi formalitas dalam rapat tahunan tanpa ruh partisipasi. Di banyak tempat, koperasi bukan lagi “milik bersama”, tapi milik segelintir orang yang tahu cara memegang kunci laci dan stempel.

Padahal, keadilan sosial dalam koperasi tidak diukur dari besarnya laba atau asset saja. Melainkan dari siapa yang menikmati hasilnya dan bagaimana prosesnya dijalankan.

Sebuah koperasi yang sehat bukan sekadar yang untung besar, tapi yang mampu membuat setiap anggota merasa dihargai. Bukan hanya jadi nama di daftar keanggotaan, yang tak pernah didengar suaranya.

Di tengah arus globalisasi dan pasar bebas yang semakin kejam, koperasi semestinya menjadi tameng terakhir bagi mereka yang paling rentan. Petani kecil, nelayan tradisional, buruh harian, hingga ibu rumah tangga yang mengais rezeki dari dapur. Mereka semua adalah wajah konkret rakyat yang kadang terpinggirkan dalam skenario pembangunan ekonomi nasional. Tetapi di tangan koperasi yang berpihak, mereka bisa menjadi pemeran utama.

Namun, menegakkan keadilan sosial tidaklah mudah. Koperasi kerap tersandung pada birokrasi yang rumit, budaya elitis yang mengakar, dan godaan korupsi kecil-kecilan yang disamarkan sebagai “uang lelah.”

Lebih berbahaya lagi, tekanan agar koperasi “berorientasi pasar”, malah sering memaksa mereka meninggalkan jati diri. Di luar tampak modern, tapi di dalam kehilangan roh gotong royong.

Meski begitu, masih ada secercah harapan. Di banyak pelosok, bukti nyata menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam koperasi bukanlah mitos.

Di Sulawesi, Koperasi Kakao Sultra (2023) menjadi mitra adil bagi petani, tidak hanya menyalurkan hasil panen, tetapi juga memperjuangkan harga yang wajar. Di Flores, Koperasi Wanita Mandiri (2022) berhasil memperpendek rantai pasok pangan lokal, menjual hasil dapur mereka langsung ke sekolah-sekolah tanpa perantara.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa, ketika koperasi dikelola dengan integritas dan niat tulus, keadilan sosial bukan sekadar utopia, melainkan bukti yang nyata dan dapat diukur.

Kuncinya sederhana. Transparansi yang tak main-main, partisipasi anggota yang aktif, dan integritas pengurus yang teguh.

Transparansi berarti setiap laporan keuangan terbuka bagi semua anggota, bukan hanya segelintir pengurus.

Partisipasi menegaskan bahwa setiap anggota berhak menentukan arah organisasi, bukan hanya menjadi pendengar setia.

Dan integritas menjaga agar koperasi tetap menjadi rumah bersama, bukan kendaraan politik lokal atau ladang bisnis pribadi.

Jika ketiga pilar ini ditegakkan, koperasi akan tumbuh bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi rakyat, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketimpangan struktural. Koperasi semacam ini tidak hanya menabung uang, tetapi menabung martabat. Ia tidak sekadar menjual produk, tetapi memperdagangkan harapan.

Keadilan sosial yang diperjuangkan lewat koperasi adalah bentuk paling nyata dari sila kelima Pancasila. Bukan tulisan indah di dinding balai desa. Tetapi napas yang hidup di antara para anggotanya.

Bila koperasi mampu menjaga semangat ini, maka ia tidak akan menjadi pajangan administratif bagi pejabat lokal, melainkan ruang hidup yang nyaman, adil, dan bermartabat bagi seluruh rakyat yang percaya pada kuatnya kebersamaan.

Reinkarnasi atau Renovasi?

Koperasi kini sedang naik daun lagi. Pemerintah memanggilnya “masa depan ekonomi rakyat”. Media sosial menobatkannya “model bisnis berjiwa gotong royong”, dan seminar-seminar menempatkannya di panggung utama, lengkap dengan slogan “koperasi digital” dan “ekonomi kolaboratif”. Rasanya, koperasi sedang menjalani fase *comeback tour*, seperti penyanyi lawas yang tiba-tiba viral lagi berkat remix TikTok.

Namun, mari kita bertanya dengan sedikit kejujuran dan sejumput kesadaran. Apakah koperasi sedang bereinkarnasi menjadi kekuatan baru. Atau hanya direnovasi permukaannya dengan cat digital agar tampak muda di mata investor dan pembuat kebijakan?

Koperasi kini bisa punya akun Instagram, aplikasi berbasis *blockchain*, dan rencana kolaborasi dengan *influencer*. Tapi apakah semua itu membuatnya lebih relevan bagi rakyat, atau justru semakin menjauh dari akarnya?

Jangan-jangan, semangat kolektif yang dulu lahir dari lumbung padi dan pertemuan di balai desa, kini berganti menjadi deretan notifikasi, *dashboard analytics*, dan *caption* promosi yang tak lagi bernyawa.

Digitalisasi memang penting. Tapi ia bukan jaminan pencerahan. Aplikasi koperasi yang canggih tak berarti apa-apa bila anggotanya masih bingung menekan tombol *login*.

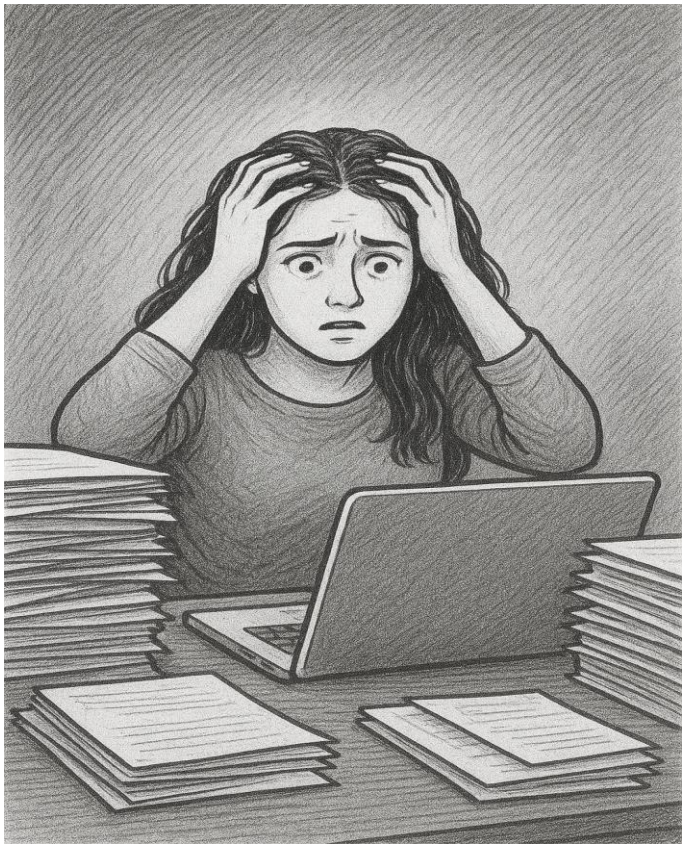

Sistem daring yang megah tak akan membawa perubahan jika pengurusnya masih berpikir analog, tertutup, elitis, dan alergi transparansi.

Inilah titik krusialnya. Teknologi hanya akan mempercepat kebusukan lama jika mentalitasnya belum bertransformasi.

Kalau semangat gotong royong diganti dengan *algoritma*, koperasi bukan lagi rumah rakyat, melainkan *startup* gagal yang kehilangan marwah. Obsesi pada tampilan luar, seperti mencari viralitas, justru menjadi tanda kehilangan arah.

Kecenderungan kehilangan marwah ini tampak jelas ketika banyak koperasi sibuk mencari panggung. Kolaborasi dengan *influencer* dianggap jalan pintas menuju "modernisasi", sebuah upaya instan untuk menutupi masalah struktural.

Bayangkan, seorang selebgram mengiklankan "produk koperasi keren dari desa", tanpa tahu siapa yang membuatnya, bagaimana anggotanya dibayar, atau apakah koperasi itu sungguh hidup. Ini bukan transformasi, ini kamuflase digital, layaknya menempelkan filter Instagram pada wajah ekonomi rakyat yang letih.

Padahal, koperasi tak butuh pencitraan. Ia butuh pembaruan makna. Koperasi yang benar-benar seksi bukan yang punya *feed* rapi dan *jingle* viral. Melainkan yang mampu menciptakan kemandirian anggota, membangun rasa percaya, dan menumbuhkan solidaritas ekonomi.

Koperasi sejati bukan sekadar aplikasi di ponsel, tapi sistem kehidupan yang menegakkan keadilan sosial, di mana setiap anggota merasa memiliki dan dilibatkan.

Jika digitalisasi ingin bermakna, maka ia harus berpijak pada tiga hal, yaitu literasi, integritas, dan partisipasi. Literasi agar setiap anggota paham apa yang mereka miliki. Integritas agar teknologi tak menjadi selimut untuk menutupi ketimpangan baru. Dan partisipasi agar koperasi tetap menjadi ruang kolektif, bukan arena kekuasaan digital versi baru.

Reinkarnasi koperasi tidak akan datang dari *upgrade* sistem atau desain aplikasi. Ia lahir dari renovasi nilai. Mengembalikan koperasi pada jati dirinya sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek modernisasi.

Koperasi tidak perlu menjadi selebgram untuk dicintai rakyat. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Tulus, transparan, dan berakar kuat pada solidaritas.

Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat bantu. Yang menentukan hidup atau matinya koperasi adalah jiwa yang menggerakkannya. Bila roh itu hilang, koperasi *almarhumah*.

Koperasi Kembali ke Desa

Koperasi, dulu, adalah pahlawan ekonomi desa. Ia lahir dari tanah yang sama dengan petani yang berkeringat di sawah, nelayan yang menatap cakrawala, dan pedagang kecil yang menggantungkan hidup di pasar rakyat.

Tapi entah sejak kapan koperasi mulai kehilangan arah, terseret arus modernisasi dan godaan kapitalisme kota. Ia berubah menjadi lembaga yang lebih sibuk mengurus rapat, laporan, dan sertifikat ISO ketimbang urusan perut anggotanya. Rumah rakyat itu perlahan berubah menjadi toko serba ada tanpa stok. Rak tertata rapi, pajangan kosong.

Kini muncul seruan baru. Koperasi harus kembali ke desa. Ada yang menyebut ini reinkarnasi. Ada pula yang bilang sekadar renovasi. Apa pun istilahnya, semangatnya jelas. Menghidupkan kembali jantung ekonomi rakyat yang lama terlelap di bawah dominasi pasar bebas dan monopoli korporasi.

Mengapa desa? Karena di situlah ekonomi rakyat bernapas tanpa masker. Di sana, koperasi bukan slogan, tapi kebutuhan hidup. Ia adalah wadah bagi petani yang menanam harapan di tanahnya

sendiri, bagi ibu rumah tangga yang memutar modal kecil menjadi usaha keluarga, bagi pengrajin yang menganyam nilai dari keterampilan tangan. Di desa, koperasi bukan teori ekonomi, tapi urat nadi solidaritas.

Namun koperasi tak bisa sekadar pulang kampung dengan wajah lama. Desa hari ini bukan lagi desa tempo dulu. Anak mudanya melek digital. Warganya bertransaksi lewat ponsel, dan logika pasar global sudah masuk lewat layar gawai. Koperasi yang ingin hidup di desa modern harus bisa beradaptasi tanpa kehilangan jiwanya.

Digitalisasi memang membuka peluang besar. Tapi juga jebakan batman. Aplikasi koperasi, e-commerce desa, dan platform transaksi daring sering kali tampil gagah di brosur, tapi gagal di lapangan. Bukan karena idenya salah, tapi karena rohnya belum menyatu dengan kultur desa.

Di tempat di mana sinyal masih kalah cepat dari ayam berkokok, bicara *blockchain* atau *big data* kadang terasa seperti menjual mimpi urban yang belum punya pijakan nyata. Intinya, modernisasi harus dimulai dari basis, bukan dari puncak.

Teknologi seharusnya bukan panggung gaya-gayaan, melainkan alat yang membebaskan. Aplikasi koperasi desa yang sederhana tapi fungsional jauh lebih bermakna daripada sistem digital mewah yang tak bisa dijangkau anggota. Karena esensi koperasi bukan di kode program, tapi di nilai kebersamaan.

Untuk mencapai modernisasi yang mengakar, diperlukan jembatan komunikasi yang relevan.

Menariknya, ada jalan tengah yang mulai tumbuh. Yaitu, influencer desa. Bukan selebgram dengan ribuan *followers*, tapi anak muda desa yang mampu menyuarakan nilai koperasi dengan bahasa zaman. Santai tapi tajam, lokal tapi modern. Mereka bisa menjadi jembatan antara gotong royong dan algoritma, antara warisan kearifan lokal dan semangat digital.

Namun, efektivitas jembatan digital ini akan nihil jika kembalinya koperasi ke desa tidak disertai perubahan budaya organisasi yang mendasar.

Koperasi harus menanggalkan birokrasi gemuknya, membuka ruang partisipasi yang murni, dan menghapus sekat antara pengurus dan anggota. Demokrasi ekonomi tidak bisa hidup di bawah meja rapat tertutup. Transparansi bukan sekadar laporan tahunan, tapi kebiasaan sehari-hari.

Koperasi harus menjadi ruang terbuka. Di mana setiap suara didengar dan setiap tangan punya peran. Ia tidak boleh lagi menjadi lembaga yang bicara tentang rakyat, tapi bekerja untuk segelintir elit lokal. Koperasi sejati menumbuhkan rasa memiliki. Bukan hanya sekadar kepemilikan formal, tapi masa depan yang dibangun bersama.

Kembali ke desa berarti kembali ke akar, bukan mundur ke masa lalu. Koperasi yang berakar kuat di desa akan tahan guncangan pasar global, karena ia tumbuh dari solidaritas, bukan spekulasi. Ia berdiri di atas tanah yang subur oleh nilai gotong royong, bukan di atas menara kapitalisme yang hanya mengenal laba.

Pada akhirnya, koperasi bukan sekadar struktur ekonomi. Ia adalah peradaban kecil yang berdenyut di antara ladang dan laut, di antara tangan-tangan yang bekerja tanpa sorotan kamera.

Di sanalah, di tengah desa, koperasi menemukan kembali maknanya. Menjadi tempat manusia bekerja bersama, berbagi rezeki, dan menjaga martabat hidupnya, tanpa harus tunduk pada *algoritma* atau kapital yang tak punya belas kasih.

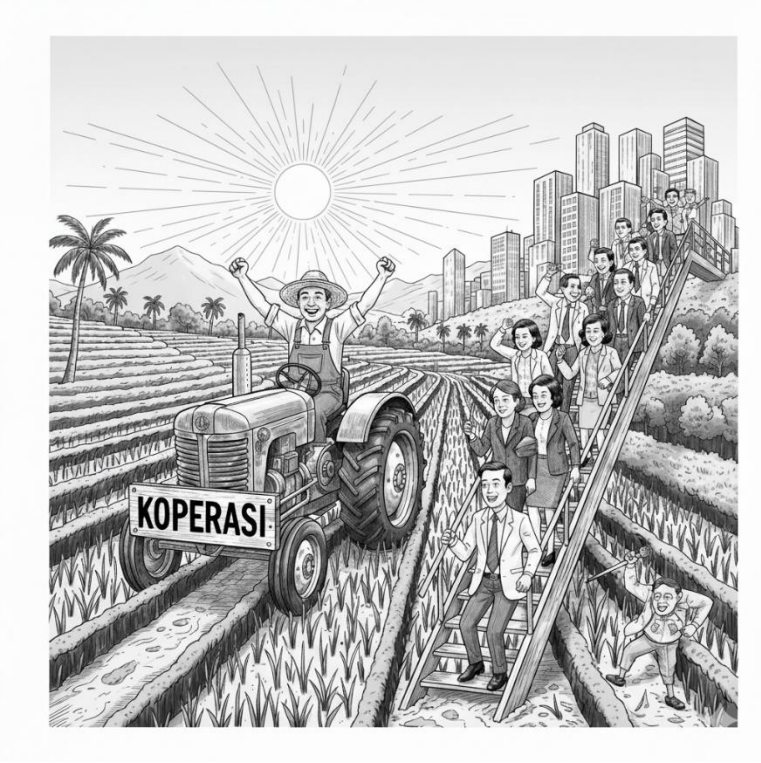

Revolusi Moral Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat selalu lahir dari kesederhanaan, namun kerap mati karena ketidaksungguhan. Di banyak tempat, koperasi, kelompok tani, dan usaha kecil berdiri dengan semangat yang gemuruh, tapi perlahan padam di tengah kabut kepentingan. Bukan karena rakyat tak mampu, melainkan karena sistem yang dikelola tanpa moralitas. Inilah akar krisis ekonomi rakyat kita, bukan pada modal, tetapi pada moral.

Ekonomi rakyat sejatinya berakar pada nilai gotong royong. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pernah berkata, “Koperasi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan gerakan moral untuk memperbaiki nasib manusia.” Kalimat itu menegaskan bahwa koperasi tidak lahir dari kalkulasi laba, tetapi dari kesadaran sosial bahwa kesejahteraan hanya mungkin jika dibangun bersama. Namun kini, nilai moral itu terkikis oleh praktik administratif yang kering makna. Banyak koperasi berdiri hanya untuk mengejar bantuan, bukan untuk membangun kemandirian.

Kita menyaksikan ironi ini di lapangan. Program bantuan bergulir kerap berhenti di tangan

segelintir elit pengurus. Laporan keuangan dibuat seadanya. Rapat anggota tahunan dijalankan sekadar formalitas. Sementara anggota hanya menjadi penonton. Di titik inilah moral publik kehilangan daya. Thomas Lickona, seorang pakar pendidikan karakter, pernah menulis: “Bangsa yang kehilangan moralitas publiknya, sedang menyiapkan kehancurannya sendiri, betapa pun cerdas dan makmurnya.”

Moral ekonomi rakyat bukan soal agama atau etika formal. Tetapi soal tanggung jawab sosial. Saat pengurus koperasi berani bersikap jujur, saat petani memilih menjual dengan harga wajar tanpa menipu timbangan, saat pengrajin tidak memalsukan bahan demi keuntungan singkat, di situlah revolusi moral dimulai. Ia bukan gerakan besar dengan spanduk dan slogan heroik, melainkan perubahan kecil yang lahir dari nurani.

Kita dapat belajar dari kisah inspiratif Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di Kalimantan Barat. Didirikan dengan semangat solidaritas, koperasi ini tumbuh karena satu hal, integritas. Setiap keputusan penting disahkan melalui musyawarah terbuka, dan laporan keuangan dipublikasikan kepada semua anggota. Hasilnya, kepercayaan tumbuh, anggota bertambah, dan aset meningkat pesat. Tidak ada rahasia, tidak ada “orang dalam”, hanya disiplin dan kejujuran yang konsisten.

Hal serupa juga terlihat pada Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur, yang kini menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia. Mereka membangun bisnis berbasis nilai moral santri, amanah, keadilan, dan kejujuran. Sehingga

koperasi tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga dipercaya masyarakat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa moralitas adalah modal yang tak bisa digantikan oleh uang.

Sayangnya, masih banyak lembaga ekonomi rakyat yang kehilangan arah moral. Dalam berbagai kasus, pengurus memperlakukan koperasi seperti perusahaan pribadi. Laporan keuangan dimanipulasi, aset dijadikan jaminan pribadi, dan bantuan pemerintah disalurkan tanpa transparansi. Padahal, setiap rupiah yang dikelola adalah amanah publik. Ketika moral dikesampingkan, koperasi tak lagi menjadi wadah perjuangan, melainkan sekadar alat transaksional.

Revolusi moral ekonomi rakyat berarti mengembalikan kesadaran itu. Bahwa koperasi bukanlah tempat mencari rente, tetapi sarana untuk menumbuhkan keadilan ekonomi. Ini memerlukan keberanian untuk jujur, disiplin dalam tata kelola, dan kesediaan untuk tunduk pada transparansi. Digitalisasi, seperti yang mulai dilakukan banyak koperasi modern, hanyalah alat. Tanpa moral, sistem secanggih apa pun hanya akan memperindah kebohongan.

Ekonom Amartya Sen, peraih Nobel bidang ekonomi, pernah menulis dalam *Development as Freedom* bahwa, “Pembangunan sejati tidak hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi tentang memperluas kebebasan dan martabat manusia.” Pandangan ini menegaskan bahwa ekonomi tanpa etika akan kehilangan arah kemanusiaannya. Sebaliknya, moralitas publik yang kuat akan melahirkan ekonomi yang tangguh.

Maka, revolusi moral ekonomi rakyat harus dimulai dari dalam. Dari pengurus koperasi yang berhenti memanipulasi. Dari anggota yang berani bertanya. Dan, dari pemerintah yang berani menegakkan transparansi tanpa kompromi. Koperasi yang sehat bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling jujur.

Kita boleh memiliki sistem digital terbaik, laporan keuangan paling rapi, dan pelatihan paling modern. Tetapi tanpa kejujuran dan rasa tanggung jawab sosial, semuanya hanyalah etalase yang kosong.

Kini, saat dunia bergerak ke arah keterbukaan dan kecepatan, saat generasi muda mulai membangun bisnis berbasis komunitas dan teknologi, ekonomi rakyat harus menemukan napas moralnya kembali. Karena pada akhirnya, keadilan ekonomi tidak bisa dibangun di atas ketidakjujuran.

Dan seperti pesan Bung Hatta yang tak pernah lekang waktu, “Tanpa moral, koperasi hanyalah bangkai tanpa jiwa.”

Bagian V
Horison Baru

Rumah Lama Harapan Baru

Koperasi kini kembali naik panggung nasional. Kali ini di bawah sorotan lampu istana. Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, menargetkan lahirnya 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan.

Angka itu terdengar merdu, seperti simfoni kebangkitan ekonomi rakyat. Negara seolah berkata kepada warganya, “Aku kembali.”

Setelah puluhan tahun ekonomi rakyat berjalan pincang di antara proyek, proposal, dan janji subsidi, negara akhirnya menapaki kembali jalan yang paling sepi namun paling penting, jalan pulang ke desa.

Delapan puluh ribu koperasi bukan sekadar target administratif. Ia adalah fondasi moral dan ekonomi menuju visi besar Indonesia Emas 2045 dengan mengawinkan kemandirian ekonomi dengan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, koperasi didorong menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, bukan hanya melalui simpan pinjam, tetapi juga pengelolaan sembako, klinik, apotek, hingga

cold storage yang menjaga hasil tani dan tangkapan nelayan tetap bernilai.

Peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Bentangan, Klaten, pada 21 Juli 2025 menjadi simbol kebangkitan koperasi sebagai rumah lama yang kini kembali berdenyut dengan harapan baru. Langkah ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ia merupakan gestur politik yang sangat bermakna, tanda bahwa negara tengah berusaha menanamkan kembali akar ekonominya di tengah rakyat.

Program pendirian 80.000 unit KMP di seluruh Indonesia layak disebut kebijakan revolusioner. Ia tidak sekadar menghidupkan kembali lembaga lama, melainkan merekonstruksi fondasi ekonomi kerakyatan dari bawah ke atas. Semangatnya bukan industrialisasi gaya lama, melainkan demokratisasi ekonomi yang tumbuh dari gotong royong, energi sosial yang telah lama menjadi tulang punggung bangsa ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 131.617 unit, dengan volume usaha sekitar Rp 214 triliun, atau setara dengan 0,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan bahwa sektor koperasi, meski bertumbuh, masih memiliki ruang sangat luas untuk berkembang. Kehadiran KMP di sini akan memperluas jaringan kelembagaan ekonomi rakyat hingga hampir dua kali lipat dari kapasitas yang sudah ada, sebuah lompatan yang tidak kecil.

Di tingkat mikroekonomi desa, KMP menjawab dua persoalan klasik yang selama ini menjerat ekonomi rakyat: minimnya akses permodalan dan cengkeraman tengkulak dalam tata niaga hasil pertanian.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis anggota, KMP membuka pintu bagi petani dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh pinjaman dengan bunga ringan, maksimal 6 persen per tahun, dan bahkan dapat bertindak sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi anggotanya dengan bunga hanya 3 persen.

Dengan asumsi plafon pinjaman mencapai Rp 3 miliar per koperasi, total potensi penyaluran modal kerja di seluruh Indonesia bisa menembus Rp 240 triliun.

Selanjutnya, jika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap koperasi minimal memiliki 20 anggota. Artinya, sedikitnya 1,6 juta warga desa akan langsung terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif melalui KMP.

Lebih dari sekadar lembaga permodalan, KMP juga berfungsi sebagai agen stabilisasi harga dan reformasi rantai pasok desa. Dengan bertindak sebagai agregator hasil panen dan distributor kebutuhan pokok serta sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, KMP memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang dan tidak efisien. Dari situ, petani mendapat harga jual yang lebih baik, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, sementara masyarakat desa dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar Peningkatan efisiensi ini diperkirakan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) agregat hingga Rp 1,19 triliun per tahun, sebuah sumber baru bagi kesejahteraan anggota sekaligus penguatan ekonomi lokal.

Dan di sinilah konsep KMP menunjukkan orisinalitasnya, 20 persen dari SHU dialokasikan langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana sebesar itu akan mengalir ke sektor-sektor nyata seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, yang selama

ini menjadi nadi ekonomi rakyat tetapi sering dibiarkan berjalan sendiri.

Secara nasional, mekanisme ini berarti Rp 238 miliar dana tambahan akan mengalir ke kas desa setiap tahun. Di luar Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah pusat. Untuk konteks, pagu Dana Desa tahun 2024 mencapai Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia (*Data Kementerian Keuangan*, 2024).

Tambahan Rp 238 miliar dari KMP membuat total uang beredar di desa meningkat menjadi Rp 71,238 triliun, atau naik 0,34 persen dari total pagu nasional. Sekilas, tambahan itu tampak kecil dalam skala makro. Namun, di tingkat mikrodesa, dampaknya sangat terasa. Setiap desa akan menerima tambahan rata-rata Rp 3,16 juta per tahun dari alokasi SHU KMP, jumlah yang cukup berarti untuk mendukung pelatihan wirausaha, memperkuat kelompok tani, memperbaiki sarana produksi sederhana, atau bahkan membiayai program pemberdayaan perempuan. KMP, dengan demikian, bukan hanya wadah ekonomi, melainkan juga mitra pembangunan sosial yang memperkuat kemandirian fiskal desa.

Secara makro, kehadiran 80.000 KMP memiliki daya dorong struktural bagi perekonomian nasional. Dengan asumsi kenaikan volume usaha minimal Rp 1 miliar per unit, maka tambahan agregat bagi ekonomi koperasi nasional mencapai Rp 80 triliun per tahun. Peningkatan ini akan mengerek kontribusi sektor koperasi terhadap PDB nasional dari 0,97 persen menjadi lebih dari 1,5 persen. Di balik angka-angka itu, tersimpan

pesan sederhana, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berakar di desa, bukan hanya di kota.

Lebih jauh, jika setiap koperasi menyerap sedikitnya lima tenaga kerja tetap, maka 400.000 lapangan kerja baru akan tercipta di pedesaan. Lapangan kerja ini menjadi bantalan sosial yang mampu mengurangi pengangguran terbuka sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem, masalah yang hingga kini masih terkonsentrasi di wilayah rural. Dengan begitu, KMP berfungsi ganda. Sebagai motor ekonomi sekaligus instrumen pemerataan sosial.

Dengan menjadikan desa sebagai titik berangkat, Prabowo tidak hanya berbicara tentang koperasi, tetapi tentang rehabilitasi kehadiran negara. Ia menempatkan kembali pusat gravitasi pembangunan di tempat yang paling lama diabaikan. Yaitu, tanah di mana rakyat hidup, menanam, dan berharap.

Koperasi Merah Putih, dalam konteks ini, bukan sekadar program. Ia adalah koreksi terhadap sejarah panjang relasi negara dan rakyat. Sebab sesungguhnya, yang selama ini hilang bukanlah modal, melainkan motor moral yang menggerakkan ekonomi akar rumput. Kita terlalu sering menambal lubang kemiskinan dengan angka-angka subsidi, tetapi lupa menyalakan api kemandirian di dada rakyat. Dan jika kita menoleh ke belakang, sejarah telah memberi pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika motor moral itu absen.

Kita pernah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD), proyek besar yang digadang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan pada era Orde Baru.

Dengan jaringan lebih dari 60.000 unit, KUD sempat menjadi wajah kebanggaan ekonomi rakyat. Tapi lambat laun, wajah itu memucat. KUD berubah menjadi biro administrasi, perpanjangan tangan kekuasaan lokal. Ia kehilangan jiwa karena negara hanya hadir sebagai instruktur, bukan rekan seperjuangan.

KUD mati bukan karena prinsipnya salah. Tetapi karena semangat gotong royongnya diubah

menjadi hierarki komando. Ia terkubur oleh birokrasi yang terlalu yakin, bahwa rakyat hanya perlu diarahkan, bukan diajak berpikir.

Kini, Prabowo tampaknya belajar dari ironi itu. Koperasi Merah Putih tidak didesain sebagai reinkarnasi KUD, melainkan sebagai reorientasi moral pembangunan.

Maka, ketika Prabowo menempatkan koperasi desa sebagai sumbu kebangkitan ekonomi rakyat, itu bukan romantisme masa lalu. Melainkan langkah strategis untuk menyalakan kembali semangat yang telah lama redup. Ia berangkat dari kesadaran bahwa ekonomi rakyat hanya bisa bangkit jika rakyat sendiri memiliki *sense of ownership*, bukan sekadar penerima manfaat.

Negara kali ini tidak berdiri di menara pengawasan, melainkan turun di tanah, bergelut bersama rakyat dalam lumpur persoalan. Kehadiran negara di tengah rakyat dalam konteks ini adalah syarat mutlak bagi kedaulatan ekonomi.

Kehadiran Koperasi Merah Putih bukan hanya soal menghidupkan lembaga lama, melainkan menanam ulang fondasi daya tahan rakyat (*resilience*) di tengah gelombang zaman. Ketika globalisasi menghadirkan badai harga pangan dan energi, inflasi mengetuk pintu dapur, sementara disrupsi digital mengancam warung kecil hingga petani tradisional, maka di sinilah koperasi menemukan peran barunya.

Ia bukan sekadar mekanisme distribusi barang, tetapi juga perisai sosial. Koperasi pangan bisa menahan gejolak harga beras. Koperasi energi

bisa mengurangi ketergantungan pada mafia distribusi. Koperasi simpan pinjam bisa melindungi rakyat dari jerat rentenir digital yang menjelma sebagai *fintech predator*.

Dengan bahasa lain, koperasi adalah bantalan sosial-ekonomi. Ketika pasar global bergejolak, koperasi menjaga rakyat berdiri tegak. Ketika disrupsi digital melahirkan jurang, koperasi bisa menjadi jembatan. Namun kebijakan sebesar ini tidak bisa bertumpu pada niat semata. Ia memerlukan ekosistem kejujuran, disiplin sosial, dan kesadaran bersama. Karena niat paling tulus pun bisa hancur di tangan birokrasi yang sinis.

Oleh karena itu, upaya reformasi sebesar ini membutuhkan fondasi moral dari pimpinan tertinggi. Niat dan kehendak murni pemimpin adalah pondasi moral yang tak terbantahkan dalam upaya ini.

Fondasi moral itu sudah terlihat dari komitmen pribadi Prabowo, yang pernah lantang menyatakan bahwa: “Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebenaran, saya ingin mati membela rakyat saya... saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia, saya tidak ragu-ragu,” (*Kompas*, 23 September 2024).

Komitmen moral Prabowo itu ditopang oleh pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang menyebut Prabowo sebagai “orang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia” (*DetikNews*, 29 September 2024). Keikhlasan

moral ini harus diterjemahkan secara nyata ke dalam sistem kelembagaan yang anti-korup.

Persoalannya sekarang, mampukah Koperasi Merah Putih melibatkan rakyat bukan sebagai “objek program”, melainkan sebagai subjek pembangunan?

Jika iya, maka inilah tonggak baru sejarah ekonomi Indonesia, ketika negara dan rakyat kembali berjabat tangan bukan dalam seremoni, tetapi dalam kerja sehari-hari. Bila gagal, ia akan menjadi bab lain dalam buku satire koperasi.

Tetapi kali ini, mari kita beri ruang bagi harapan. Sebab barangkali, untuk pertama kalinya sejak republik berdiri, ada seorang pemimpin yang tidak hanya ingin membangunkan koperasi dari tidur panjangnya, tetapi juga bersedia ikut begadang bersamanya.

Harapan besar ini juga perlu ditopang oleh pembelajaran dari pengalaman global. Di banyak negara, koperasi modern menjadi tulang punggung perekonomian. Namun, perjalanan mereka yang penuh paradoks, menunjukkan bahwa tantangan terbesar koperasi selalu terletak pada menjaga idealisme di tengah tekanan manajemen dan politik.

Di Brasil, koperasi tumbuh dari akar petani dan gereja Katolik. COAMO, berdiri tahun 1970, kini memiliki lebih dari 30.000 anggota dan mengekspor ke 20 negara. Koperasi ini bukan sekadar menjalankan bisnis pertanian, tetapi simbol perlawanan terhadap monopoli tanah. Ironinya, sebagian koperasi yang dulu lahir dari

idealisme sosial, kini lebih sibuk menyesuaikan laporan laba rugi daripada memperjuangkan kesejahteraan anggota. Ketika idealisme berubah menjadi manajemen, semangat awal perlawanan dan gotong royong pun kian memudar.

Di Korea Selatan, koperasi lahir dari reruntuhan krisis finansial 1997 (ICA *Asia-Pacific*, 2020). *Hansalim* menjadi contoh paling progresif, menghubungkan dua juta petani organik dan konsumen kota.

Namun generasi digital hari ini menghadirkan dilema baru, yaitu bagaimana mempertahankan "jiwa bersama" dalam masyarakat yang semakin individualistik dan terserap algoritma ekonomi daring?

India memberi bab lain dalam literasi koperasi dunia. *Amul*, dengan 3,6 juta anggota koperasi susu yang berdiri tahun 1946 ini, mampu mengubah India dari importir menjadi produsen susu terbesar dunia (MacPherson, 2013). Di sini, koperasi bukan proyek ekonomi, tetapi gerakan kemerdekaan sosial.

Namun *Amul* sendiri tak luput dari paradoks. Birokrasi dan patronase politik perlahan mengaburkan ideal awalnya. Koperasi yang dulu membebaskan kini harus berjuang untuk tidak menjadi sistem baru yang membelenggu.

Jepang menghadirkan bab yang berbeda. JA Group (*Japan Agricultural Cooperatives*) berdiri di atas tradisi pascaperang yang menekankan swasembada pangan dan solidaritas desa.

Dengan lebih dari 10 juta anggota dan ribuan unit koperasi lokal, JA Group menguasai hampir seluruh rantai nilai pertanian, dari produksi, distribusi, hingga perbankan.

Tidak ada sayur, beras, atau susu di Jepang yang perjalanannya tidak pernah bersentuhan dengan JA. Menurut laporan ICA *Asia-Pacific* (2020), JA Group menyumbang 45% distribusi pangan nasional Jepang.

Namun kekuatan raksasa ini juga menghadapi kritik. Terlalu birokratis, terlalu terikat dengan politik pertanian, bahkan dianggap menghambat liberalisasi pasar. Ujungnya, koperasi yang lahir dari kebutuhan rakyat kecil justru dituduh menjadi oligopoli baru berbaju demokrasi ekonomi.

Tiongkok menghadirkan ironi lain. Di sana, koperasi bukan hasil pemberontakan rakyat, tetapi instrumen negara untuk menertibkan ekonomi desa.

Dengan lebih dari dua juta *Farmer Specialized Cooperatives* dan 200 juta anggota, Tiongkok menunjukkan kekuatan berbobot, namun kehilangan satu hal paling mendasar dari tradisi koperasi yakni, otonomi moral (Axworthy, 1977).

Apa yang membedakan mereka? Bukan semata modal, tetapi konsistensi prinsip. Koperasi diperlakukan bukan sebagai proyek, melainkan sebagai ekosistem hidup. Negara hadir sebagai mitra, bukan penguasa. Rakyat diberi ruang untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti.

Koperasi adalah rumah lama yang pernah retak, penuh debu, bahkan nyaris ditinggalkan. Tetapi justru karena itu, ia juga rumah paling otentik untuk menyimpan harapan baru. Bukan sekadar bangunan ekonomi, tetapi ruang hidup sosial. Tempat rakyat belajar tanggung jawab, kejujuran, solidaritas, dan kemandirian.

Jika ini berhasil, maka koperasi akan kembali menjadi denyut nadi rakyat. Ia tidak hanya bertahan menghadapi gelombang zaman, tetapi juga memimpin barisan, membawa Indonesia menuju masa depan di mana ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan juga soal martabat.

Epilog

Koperasi bukan lembaga kuno, meski kerap dikurung dalam kesan jadul. Di era digital, ia justru berpotensi menjadi bentuk ekonomi yang paling relevan, karena sifatnya partisipatif, terbuka, dan kolaboratif.

Paradoksnya, di tengah dunia yang serba daring, sebagian koperasi masih takut pada kata "aplikasi," "*dashboard*," atau "*big data*." Seolah teknologi adalah ancaman, bukan alat perjuangan.

Padahal, zaman sudah berubah. Koperasi tidak bisa lagi terpaku seperti warung atau kios yang menjual gunting kuku dan sabun cuci. Ia harus melek data, paham literasi digital, dan berani mengelola manajemen berbasis teknologi.

Kejujuran sekarang diukur dalam algoritma. Koperasi yang menolak digitalisasi sedang menulis surat kematiannya sendiri dengan mesin tik.

Transparansi kini bukan sekadar niat baik. Ia adalah sistem. Anggota harus bisa mengakses laporan keuangan secara real time, menyampaikan keluhan lewat platform digital, dan

memperoleh layanan tanpa ritual bolak-balik ke kantor desa dengan map plastik. Pemerintah pun dituntut menyediakan infrastruktur digital desa yang memadai. Jangan lagi ada alasan “jaringan belum merata” sebagai pembenaran stagnasi.

Sebab faktanya, judi online, hoaks, pinjol, dan video TikTok bisa menembus dusun terpencil. Mengapa layanan koperasi tidak?

Era digital sebetulnya memberi peluang besar untuk membongkar koperasi abal-abal. Platform daring bisa menjadi cermin kejujuran kolektif, mendeteksi mana koperasi yang hidup dan mana yang tinggal kop suratnya saja.

Di masa lalu, kebohongan bisa disembunyikan rapi di laci laporan tahunan koperasi. Manipulasi angka hanya beredar di ruang rapat yang tertutup, jauh dari jangkauan anggota biasa.

Namun kini, satu unggahan viral di media sosial bisa merobohkan reputasi pengurus yang dibangun bertahun-tahun. Era digital membuat kejujuran bukan lagi pilihan moral, melainkan syarat untuk bertahan.

Karenanya, tata kelola yang bersih bukan sekadar etika, tetapi *survival strategy*. Seperti diingatkan Joseph Schumpeter, “setiap sistem ekonomi yang tak mampu berinovasi, akan mati dimakan sistemnya sendiri.” Maka koperasi pun menghadapi pilihan yang sama: berbenah atau punah.

Jika ingin tetap hidup, koperasi harus menjelma menjadi makhluk digital yang bernyawa gotong

royong, menggabungkan teknologi dengan nilai solidaritas, sehingga tidak hanya modern secara sistem, tetapi juga kokoh secara moral.

Sayangnya, proses kebangkitan ini kerap terhambat oleh beban sejarah. Koperasi terlalu lama menjadi korban romantisisme politik. Dielu-elukan sebagai soko guru perekonomian, lalu dilupakan. Dihidupkan kembali saat kampanye, lalu dikubur lagi di bawah papan nama, laporan *copy-paste*, dan pelatihan seremonial.

Kini, dengan adanya inisiatif baru, muncul upaya tulus untuk menyalakan kembali bara yang lama padam. Jangan sampai, redup lagi. Sebab kehendak tulus itu sudah dibalut merah putih.

Tentu ada survei yang sinis. Ada pendapat yang bertanya-tanya, dan komentar yang nyinyir. Tapi sejarah tak pernah digerakkan oleh mayoritas yang ragu, melainkan oleh minoritas yang berani maju.

Koperasi memang bukan jaminan untuk menjadi hebat. Tapi ia adalah peluang. Sebuah ruang di antara negara yang terlalu dominan dan pasar yang terlalu rakus. Ruang di mana warga bisa berhitung tanpa kehilangan nurani, bisa untung tanpa kehilangan gotong.

Jika gagal, biarlah ia gagal dengan terhormat, karena telah dicoba dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas.

Tapi jika berhasil, barangkali ia akan menjadi satu bab penting dalam buku sejarah ekonomi bangsa. Bahwa, di tengah zaman yang sinis dan

pragmatis, masih mungkin membangun sistem yang manusiawi, adil, dan berkeadaban.

Dan siapa tahu, dari segelintir yang percaya hari ini, kelak tumbuh generasi yang akan mengucap syukur bahwa, mereka pernah menyaksikan koperasi lahir kembali, bukan sebagai retorika, melainkan sebagai harapan yang menyala.

Referensi

Buku dan Jurnal Akademik

1. Birchall, J. (1997). The *International Co-operative Movement*. Manchester: Manchester University Press.
2. Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). New York: Greenwood.
3. Chaves, R., & Monzón, J. L. (2012). *The social economy in the European Union*. European Economic and Social Committee. Brussels.
4. Coleman, J. S. (1988). *Social capital in the creation of human capital*. American Journal of Sociology, 94, S95–S120.
5. Granovetter, M. (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.
6. Hatta, M. (1971). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: UI Press.
7. Hendar, & Kusnadi, A. (2005). Ekonomi Koperasi: Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers.
8. Huda, M., dkk. (2023). *Digitalisasi koperasi di era disrups*i: Studi kasus implementasi sistem Alokop di Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Koperasi Indonesia, 18(2), 55–72.
9. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
12. Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
13. Restakis, J. (2010). *Humanizing the Economy: Co-operatives in the Age of Capital.* Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
14. Schumacher, E. F. (1973). *Small Is Beautiful: Economics as if People* Mattered. London: Blond & Briggs.
15. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
16. Swasono, S.-E. (2010). *Koperasi: Identitas Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
17. Syaiful, A. (2023). *Transformasi digital dan dampaknya pada UMKM binaan koperasi: Studi kasus Bintang Muda 88*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 25(3), 201–219.

Peraturan Perundang-undangan

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 116.

2. Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Berita Negara RI Tahun 2018 No. 509.

Laporan dan Dokumen Resmi

1. *Credit Union National Association (*CUNA). (2022). Annual Report 2022. Washington, DC.
2. ICA (International Co-operative Alliance). (2015). Co-operative Identity, Values & Principles. Geneva: ICA.
3. ICA Asia-Pacific. (2017). *Co-operatives in Industrial and Service Sectors*. New Delhi: ICA-AP.
4. ILO. (2014). *Cooperatives and the Sustainable Development Goals: A Contribution to the Post-2015 Development Debate*. Geneva: International Labour Organization.
5. Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Statistik Koperasi dan UMKM 2014–2019*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
6. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM* 2020–2024. Jakarta.

Artikel Media

1. CNBC Indonesia, Startup Tumbasin tutup karena masalah keuangan, 5 Mei 2023.
2. Katadata, Kisah gagalnya Tumbasin di tengah euforia agri-tech, 8 Mei 2023.

3. El País. (2020, 2 Maret). Barçagate: Police detain Barcelona officials over social media scandal.
4. Gani. (2017). Kasus investasi bodong berkedok koperasi: Pandawa Group gagal bayar miliaran rupiah. Tempo.

5. *Kompas*. (2019, 12 Juli). 82 ribu koperasi dibubarkan, jumlah menyusut jadi 127 ribu. Kompas.com.
6. *Tempo.* (2018, 23 Oktober). Koperasi hanya tinggal nama di banyak desa. Tempo.co.
7. The Guardian. (2013). Co-op Bank's collapse: Failures in governance and management led to bailout.
8. *The Guardian.* (2021, 7 Maret). Joan Laporta elected Barcelona president for a second term.

Sumber Historis dan Pidato

1. Holyoake, G. J. (1875). *The History of Co-operation*. London: Trübner.
2. Raiffeisen, F. W. (1866). *The Credit Unions. Neuwied*.
3. Hatta, M. (1951). *Pidato Hari Koperasi Nasional*, 12 Juli 1951.
4. ICA. (1995). *Statement on the Co-operative Identity*. Geneva: ICA.

Studi Kasus Lapangan

1. Deo, Y. (2024). *Koperasi Digital di Perbatasan: Studi tentang KSP CU Kasih Sejahtera di Atambua*. Kupang: Penerbit Cakra NTT.

2. Huda, M., dkk. (2023). *Digitalisasi Koperasi di Era Disrupsi: Studi Kasus Alokop di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Koperasi Indonesia, 18(2), 55–72.
3. Syaiful, A. (2023). *Transformasi Digital dan Dampaknya pada UMKM Binaan Koperasi: Studi Kasus Bintang Muda 88*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 25(3), 201–219.
4. Koperasi Kakao Sultra. (2023). *Laporan tahunan koperasi. Kendari*: Koperasi Kakao Sultra.
5. Koperasi Wanita Mandiri. (2022). *Rantai Pasok Pangan Lokal Flores*. Ende: Koperasi Wanita Mandiri.
6. Tech in Asia, *Stoqo collapses amid pandemic disruptions*, April 2020.
7. Pengumuman Perusahaan *TaniHub*, Fokus B2B, mundur dari konsumen, Februari 2022.

Tentang Penulis

Hukman Reni lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Jejak hidupnya ditempa oleh pengalaman lintas komunitas dan budaya, sejak sekolah di Dili, Timor Timur, hingga kemudian menempuh studi hukum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Dari perjalanan itu tumbuh kepekaannya pada isu-isu sosial, hukum, dan kemanusiaan, yang kemudian menjadi benang merah dalam banyak tulisannya.

Pengalamannya sebagai Ketua Koperasi Satria Harapan Timor di Kupang, Nusa Tenggara Timur, semakin memperkuat wawasannya tentang koperasi. Dari sana, ia menyaksikan langsung dinamika di lapangan, semangat gotong royong yang menggerakkan banyak orang, dan tantangan berat yang masih membayangi koperasi di akar rumput.

Hukman Reni sebelumnya telah menulis beberapa buku, antara lain *Legenda Hukuman Mati di Indonesia* dan *Heboh Bali Nine: Eksekusi Sindikat Narkoba Australia*, yang menyoroti tema-tema pelik dengan gaya analitis, reflektif, dan terkadang satiris.

Melalui *Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru*, ia mengajak pembaca menelusuri kembali akar koperasi sebagai rumah rakyat, yang mungkin tampak rapuh, tetapi masih menyimpan fondasi kokoh untuk dibangun kembali menjadi alat perjuangan rakyat.

Koperasi
Rumah Lama Harapan Baru

Apakah koperasi masih relevan di tengah gempuran kapitalisme dan birokrasi yang kian ruwet? Ataukah ia hanya tinggal papan nama yang menunggu tanggal kadaluarsa?

Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi. Ia adalah rumah lama tempat harapan rakyat pernah singgah. Rumah itu kini tampak rapuh dan berdebu. Namun fondasinya masih kokoh, menunggu untuk direnovasi.

Dengan gaya tutur analisis reflektif yang khas, Hukman Reni mengajak kita membuka dua laci sejarah koperasi. Yang satu penuh angka-angka mati, yang lain menyimpan harapan hidup. Dari sana kita diajak melihat kemungkinan baru yang bisa tumbuh.

Buku ini bukan hanya tentang koperasi, tetapi tentang kita semua. Maukah kita membiarkan rumah lama ini roboh, atau justru menjadikannya rumah baru yang kembali menyalakan harapan?

9 783127 323207